



## KATA PENGANTAR



Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Tuntunan dan BimbinganNya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu fondasi untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun komponen-komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut mulai dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 dibuat sebagai wahana pertanggungjawaban kinerja yang mencakup informasi Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun kelima masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Sebagai wujud komitmen moral terhadap amanah yang diemban maka LKIP 2023 secara jujur, transparan dan akuntabel menginformasikan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023. LKIP Tahun 2023 sekaligus merupakan laporan kinerja akhir periode RPJMD 2018-2023.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, untuk itu segala kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaannya. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 menjadi media informasi tentang pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan



Kemasyarakatan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menjadi spirit untuk menggapai "NTT MAJU, NTT SEJAHTERA".

Tuhan Yang Maha Esa memberkati upaya kita bersama dalam membangun Nusa Tenggara Timur tercinta.

Kupang, 03 Maret 2024

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur



*Ayodhia G. L. Kalake*  
Ayodhia G. L. Kalake

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten 3 Sekda	<i>[Signature]</i>
Pit. Kepala Biro Organisasi	<i>[Signature]</i>

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

## I. PENDAHULUAN

Tuntutan reformasi yang telah bergulir menghendaki terselenggaranya Pemerintahan yang bertanggungjawab dan bebas dari pengaruh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* akan semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-hak sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam kaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel. Seiring dengan itu, perkembangan manajemen moderen telah membuktikan bahwa keterwujudan Pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dalam sebuah organisasi akan menjadi hal yang sangat penting bagi penyelenggara di mata publik. Sebagai salah satu pilar Pemerintahan yang bersih, pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara aktifitas organisasi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 20214 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya pasal 18 ayat menyebutkan bahwa: Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Untuk itu mejadi keharusan organisasatoris bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Provinsi NTT untuk menyusun Laporan Akntabilitas Kinerja pada setiap tahun.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat atas tugas dan tanggung jawab pemerintah dari sisi perencanaan, hingga pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun serta hasilnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah:



- a. Agar masyarakat mengetahui hasil kinerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Tahun 2023
- b. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan di daerah atas perencanaan yang disusun, pelaksanaan hingga hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah
- c. Sebagai media untuk mendapatkan umpan balik terhadap keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian kinerja sehingga dapat merumuskan strategi pemecahan masalah yang tepat guna peningkatan capaian kinerja Pemerintah Provinsi NTT secara berkelanjutan.

### 2.3. **Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, terdapat 21 (dua puluh satu) Sasaran Strategis yang diperjanjikan sebagai penjabaran dari 5 (lima) Misi dan 96 (sembilan puluh enam) Program. Gambaran akuntabilitas kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **Misi 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKEADILAN**

Tujuan Misi ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (stakeholder) dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk pada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

#### **Sasaran Strategis 1 : Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan**

Sasaran strategis tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan mencakup tiga (3) indikator sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	realisasi 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	3,05	6,7-7,2	3,52	52,54 - 48,22	6,7-7,2	52,54 - 48,22
2.	Inflasi	%	6,65	3-3,2	2,42	119,33-124,37	3-3,2	119,33-124,37
3.	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	21,71	25-27	23,08	92,32-85,48	25-27	92,32 - 85,48
Rata-rata Capaian						84,57		

Sumber data: BPS NTT 2023, diolah

**A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:**

**1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

**a. Capaian Target Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi (PDRB) adalah sebesar 3,52% atau dengan capaian sebesar 52,54% dari target pesimis yang ditetapkan sebesar 6,7%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 7,3%, maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada tahun 2023 hanya mencapai 48,22%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) meningkat sebesar 0,47%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 maka capaian terhadap target pesimis sebesar 52,54% dan capaian terhadap target optimis sebesar 48,22%.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

PDRB ADHB Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun terakhir RPJMD 2023 sebesar Rp. 128,523,13 triliun. Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) NTT tahun 2023 adalah dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 29,31%. Faktor lain yang mempengaruhi PDRB adalah dari lapangan usaha Perdagangan Besar

dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,52% dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,41%. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 67,48%.

## 2. Inflasi

### a. Capaian Target Inflasi

Inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,42%. Jika dibandingkan dengan target pesimis sebesar 3,2%, maka capaian indikator laju inflasi tahun 2023 adalah sebesar 124,37%, sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 3%, maka capaian indikator inflasi pada tahun 2023 adalah sebesar 119,33%. Capaian ini membaik sebesar 4,23% dari tahun 2022 sebesar 6,65%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 maka capaian terhadap target pesimis sebesar 124,37% dan capaian terhadap target optimis sebesar 119,33%.

### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2023 sebagai tahun terakhir RPJMD tercatat sebesar 2,42% membaik dibandingkan inflasi tahun sebelumnya sebesar 6,65%. Inflasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 2,61%. Penurunan inflasi terutama karena mulai normalnya kegiatan sebagai dampak dari tingginya harga beberapa komoditas *administrated price* atau bahan bakar minyak pada tahun sebelumnya, juga karena terjaganya harga dan sistem distribusi, yang kemudian menjamin ketersediaan bahan pokok. Yang menjadi permasalahan utama inflasi di NTT adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap komoditas yang didatangkan dari luar seperti beras dan ayam potong, juga tarif angkutan udara. Upaya yang perlu dilakukan untuk menekan inflasi adalah dengan mendorong penggunaan dana BTT secara optimal untuk pengadaan bahan pangan, menjaga stabilitas harga pasar, gerakan pangan murah, dan subsidi transportasi untuk mendukung distribusi.

## 3. PDRB Per Kapita

### a. Capaian Target PDRB Per Kapita

PDRB per kapita pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 23,08 Juta. Jika



dibandingkan dengan target pesimis sebesar Rp. 25 Juta, maka capaian PDRB per Kapita adalah sebesar 92,32%, jika dibandingkan dengan target optimis sebesar Rp. 27 juta, maka PDRB per kapita telah mencapai 85,48%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022, terjadi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat sebesar 1,37 Juta. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 maka capaian terhadap target pesimis sebesar 92,32% dan capaian terhadap target optimis sebesar 85,48%. Pencapaian ini masih di bawah rentang target kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar Rp 25 juta sampai dengan Rp 27 juta per kapita.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Meningkatnya PDRB per Kapita di Provinsi NTT disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat, termasuk kebijakan dibayarkannya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh, hasil produksi relatif tetap, kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga barang mulai dapat diatasi dengan berbagai kebijakan pengendalian inflasi, dilakukannya kebijakan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang semuanya berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

Sesuai penjelasan di atas, dari tiga indikator kinerja, rata-rata capaian sasaran strategis "Tumbuhnya ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan" sebesar 84,57 % dengan kategori **Berhasil**.

**Sasaran Strategis 2: Berkurangnya Kemiskinan**

Sasaran ini mencakup 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	%	20,05	15-12	19,96	66,93 - 33,67	15-12	66,93 - 33,67



No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
2.	Indeks Keparahan Kemiskinan	Poin	0,93	0,85	0,79	107,05	0,85	107,05
3.	Indeks Kedalam Kemiskinan	Poin	3,63	3,40	3,33	102,05	3,40	102,05
Rata-rata Capaian						80,53		

Sumber: BPS NTT 2023, diolah

#### A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

##### 1. Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan

###### a. Capaian target presentase penduduk di bawah garis kemiskinan

Pada tahun 2023 Persentase Penduduk Di bawah Garis Kemiskinan adalah sebesar 19,96%. Jika dibandingkan dengan target pesimis sebesar 15%, maka capaian persentase penduduk dibawah garis kemiskinan adalah sebesar 66,93%, sedangkan jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 12%, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan hanya mencapai 33,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022, terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,09%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 maka capaian terhadap target pesimis sebesar 66,93% dan capaian terhadap target optimis sebesar 33,67%. Capaian ini masih di bawah rentang target pada akhir periode RPJMD yaitu 15 – 12%.

###### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT pada Maret 2023 sebesar 19,96%, turun 0,09% terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebesar Rp 1.141,11 ribu orang meningkat 9,5 ribu jika dibandingkan dengan tahun 2022. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini sejalan dengan perubahan Garis kemiskinan, dimana selama Maret 2022- Maret 2023, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,06 persen, yaitu dari Rp 460.823 per kapita per bulan pada Maret 2022, menjadi

Rp. 507.203 per kapita per bulan pada Maret 2023. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2023, komoditi makanan menyumbang sebesar 76,80% pada garis kemiskinan, sedangkan komoditi non makanan menyumbang 23,20% terhadap garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur bukan hanya pada jumlah atau persentasenya yang tinggi, tetapi juga pada disparitas antar wilayah. Disparitas antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi, dalam rentang waktu Maret 2022 – Maret 2023, kemiskinan di perkotaan naik sebesar 0,28% poin dari 8,84% menjadi 9,12%. Sebaliknya, kemiskinan di perdesaan turun 0,1% poin, dari 23,86% menjadi 23,76%.

Jika dilihat angka kemiskinan per kabupaten/kota, pada tahun 2023 menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Sumba Tengah 31,78%, Kabupaten Sabu Raijua 28,37%, dan Kabupaten Sumba Timur 28,08%. Di sisi lain, terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Kupang 8,61%, Kabupaten Flores Timur 11,77%, dan Kabupaten Ngada 12,06%.

Daerah miskin pada umumnya selain memiliki akses pada sumber daya ekonomi rendah, juga merupakan daerah dengan tingkat pendidikan rendah, akses terhadap air bersih sulit, dan akses terhadap fasilitas kesehatan rendah. Masalah-masalah kesehatan seperti gizi buruk pada anak-anak juga lebih banyak terdapat di daerah miskin.

Penanggulangan dan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif dan komprehensif, oleh semua stakeholders, pada setiap level pemerintahan.

## **2. Indeks Keparahan Kemiskinan**

### **a. Capaian target indeks keparahan kemiskinan**

Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, dengan demikian memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di



antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2023 adalah sebesar 0.798 poin, menurun 0,134 poin dari Maret 2022 dan menurun 0.151 poin dari September 2023. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 0,85 poin, maka capaian indeks keparahan kemiskinan mencapai 107.05%. Walaupun secara total mengalami penurunan, namun jika dilihat lebih rinci, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,115 poin menjadi 0,270 poin, dari 0,155 poin pada September 2023. Namun demikian, jika dilihat dari Maret 2022, indeks keparahan kemiskinan tahun 2023 adalah sebesar 0,983 poin, turun sebesar 0,241 poin dari September 2023 sebesar 1,224 poin. Penurunan sebesar 0,150 poin juga terjadi jika disandingkan dengan kondisi Maret 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 maka capaian terhadap target sebesar 107,05%.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Indikator kinerja**

Kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga barang mengakibatkan banyak sektor mengalami kontraksi. Kontraksi yang terjadi berkorelasi lurus dengan pendapatan dan kesejahteraan. Pendapatan yang relatif menurun, hasil produksi relatif tetap, jumlah penduduk bertambah dan turunnya daya beli masyarakat meskipun pengaruhnya kecil namun tetap berkontribusi terhadap jumlah penduduk miskin dan keparahan kemiskinan.

3. **Indeks Kedalaman Kemiskinan**

a. **Capaian target indeks kedalaman kemiskinan**

Pada tahun 2023 target Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 3,4 poin, realisasi sebesar 3,33 poin dengan capaian sebesar 102,06%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 3,63 poin, terjadi penurunan sebesar 0,3 poin. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD 2023 sebesar 3,4 poin, maka capaian indeks kedalaman kemiskinan adalah sebesar 102,06 %.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis



kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan. Pada kurun waktu 2021-2023 indeks kedalaman kemiskinan perdesaan menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, sedangkan di perkotaan menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks kedalaman kemiskinan perdesaan secara umum lebih besar dari indeks kedalaman kemiskinan perkotaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin perkotaan dengan garis kemiskinan perkotaan relatif lebih dekat apabila dibandingkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin perdesaan dengan garis kemiskinan perdesaan. Diperlukan penguatan berbagai upaya yang telah berjalan selama ini, dan lebih dari itu diperlukan upaya khusus untuk menurunkan angka kemiskinan ini. Oleh karena itu, secara progresif pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan dan mensinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melaksanakan sistem pemantauan terpadu terhadap berbagai program tersebut dengan target pencapaian output yang terukur dan tepat waktu, tepat jumlah serta tepat sasaran dalam implementasi program.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis "**Berkurangnya Kemiskinan**" sebesar 80,93% dengan kategori **Berhasil**.

### **Sasaran Strategis 3 : Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktifitas Angkatan Kerja**

Sasaran ini mencakup 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,54	1,9-1,5	3,14 Agustus 2023	34,74 – (-9,33)	1,9-1,5	34,74 – (-9,33)
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,87	69,76	74,51 Februari 2023 (Suara NTT)	106,80	69,76	106,80
3.	Produktivitas Total Daerah	Rp. Juta	24,18	50,360	45,57	90,49	50,360	90,49
4.	Cakupan Pekerja Tanpa Upah yang dibandingkan Penduduk yang berkerja	%	2,89	21,02	23,14	89,91	21,02	89,91
Rata-rata Capaian								

Sumber data: BPS NTT 2023 dan Bappeitbangda Provinsi NTT, diolah

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

**1. Tingkat Pengangguran Terbuka**

**a. Capaian target tingkat pengangguran terbuka**

Tingkat pengangguran terbuka sesuai hasil rilis BPS Provinsi NTT bulan Agustus 2023 sebesar 3,14%. Jika dibandingkan dengan target pesimis tahun 2023 sebesar 1,9%, maka capaian pesimis Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 34,74%. Jika dibandingkan dengan target optimis tahun 2023 sebesar 1,5%, maka capaian optimis Tingkat Pengangguran Terbuka hanya sebesar -9,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 3,54%, terjadi penurunan sebesar 0,40%. Meskipun terjadi penurunan Tingkat pengangguran terbuka, namun kondisi ini belum memenuhi rentang target akhir RPJMD sebesar 1,9%-1,5%

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Penurunan tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh peningkatan tenaga kerja sektor primer (pertanian kehutanan, perikanan), dan maraknya usaha transportasi online. Namun kondisi ini belum cukup



menekan angka pengangguran.

## 2. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

### a. **Capaian Target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Pada tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 75,23%. Kondisi ini menggambarkan persentase banyaknya angkatan kerja usia di atas 15 tahun berbanding dengan jumlah penduduk usia di atas 15 tahun. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022 sebesar 69,67%, maka capaian TPAK adalah sebesar 107,98 %. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021 sebesar 73,78 %, terjadi peningkatan sebesar 1,45%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 69,76%, maka capaian TPAK sebesar 107,84%.

### b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan), dengan jumlah pekerja sebanyak 1.414.841 orang. Kondisi tersebut tidak berubah dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, sesuai dengan kontribusi sektor pertanian yang memiliki pangsa sangat besar terhadap perekonomian provinsi secara keseluruhan

## 3. **Produktivitas Total Daerah**

### a. **Capaian Target Produktivitas Total Daerah**

Produktivitas Total Daerah merupakan output yang mampu dihasilkan oleh setiap angkatan kerja dalam 1 (satu) tahun. Pada tahun 2023 produktivitas total daerah adalah sebesar Rp. 44,37 Juta. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar Rp. 50,36 Juta, maka capaian produktivitas total daerah adalah sebesar 88,11%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp. 24,18 juta, terjadi peningkatan sebesar Rp 20,19 juta. Kondisi ini menggambarkan capaian kinerja pada akhir RPJMD tahun 2023 telah mencapai 88,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 50,36 Juta.

### b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Produktivitas total daerah pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh PDRB per kapita yang meningkat seiring dengan



pendapatan yang meningkat serta hasil produksi relatif meningkat, diikuti dengan daya beli masyarakat yang semakin membaik.

#### 4. **Cakupan Pekerja Tanpa Upah Yang Dibandingkan Dengan Penduduk Yang Bekerja**

##### a. **Capaian target cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja**

Pada tahun 2023 cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja sebesar 24,63% atau dengan capaian sebesar 82,83% dari target yang ditetapkan sebesar 21,02%. Kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dengan dengan status pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga) berbanding dengan jumlah angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar 26,93%, terjadi penurunan sebesar 2,30%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 21,02%, maka capaian cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk yang bekerja telah mencapai 82,83%.

##### b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Turunnya cakupan pekerja tanpa upah yang dibandingkan dengan penduduk bekerja adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka yang disebabkan oleh peningkatan tenaga kerja sektor primer (pertanian kehutanan, perikanan), serta maraknya usaha transportasi online, serta banyaknya tenaga kerja yang telah dipekerjakan kembali pasca PHK yang dilakukan saat pandemi Covid.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis "**Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktifitas Angkatan Kerja**" sebesar 67,54% dengan kategori **Belum Berhasil**.

#### **Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Sasaran ini didukung oleh satu indikator kinerja yaitu :



**Tabel 4**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	31,06	39,74	30,65	77,13	39,74	77,13
Capaian					77,13		

Sumber: LKIP Badan Pendapatan dan Asef Daerah Tahun 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Persentase PAD terhadap total pendapatan**

a. **Capaian target persentase pad terhadap total pendapatan**

Target Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar 39,74% atau Rp. 1.712.892.170.870,- Realisasi sebesar 30,65% atau Rp. 1.412.898.793.358,66- atau kinerja mencapai 77,13%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,41%.

Target dan Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT**  
**Keadaan 1 Januari s/d 31 Desember 2023**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI (Rp)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,712,892,170,870.00	1,412,898,793,358.00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	1,311,609,133,150.00	1,146,811,714,087.77
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	65,433,703,905.00	35,866,582,428.60
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	60,645,290,853.00	60,645,290,853.00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	275,204,042,962.00	169,573,205,989,29
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3,201,541,919,000.00	194,678,968,455.00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,201,541,919,000.00	3,194,678,968,455.00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1,751,596,000.00	1,594,260,330.00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	1,751,596,000.00	1,594,260,330.00

Sumber data: LKIP Badan Pendapatan dan Asef Daerah Tahun 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023



b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Persentase PAD terhadap total pendapatan tahun 2023 meningkat sebesar 7,76%, namun jika dilihat dari tabel di atas, jumlah PAD pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan atau hanya mencapai 71,44% dari target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- 2) Kebijakan *refocusing* anggaran berdampak pada belanja modal perangkat daerah yang mendukung obyek retribusi tidak terealisasi;
- 3) Rencana kerja sama dengan pihak ke-3 yang telah dijadikan sebagai obyek penerimaan tidak terealisasi;
- 4) Belum tersedianya Produk Hukum bagi obyek retribusi baru.

**Sasaran Strategis 5: Menguatnya Peranan NTT Dalam Perdagangan Regional**

Sasaran ini didukung satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 6

Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	Poin	-42,84	63,10	-39,06	-61,90	63,10	-61,90
<b>Capaian</b>					-61,90		

Sumber data: BPS NTT, 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)**

a. **Capaian target rasio ekspor impor terhadap PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)**

Rasio ekspor impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi) Pada tahun 2023 sebesar -42,84 poin. Kondisi ini menggambarkan jumlah produk yang diekspor lebih sedikit dari jumlah produk yang diimpor berbanding PDRB. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 63,10 poin, maka capaian Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB adalah sebesar -61,90 poin. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar -42,84 poin, terjadi penurunan sebesar 3,78 poin. Jika dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 63,10 poin, maka capaian rasio ekspor impor terhadap PDRB sebesar -61,90%.

b. **Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Neraca perdagangan luar negeri Provinsi NTT tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp. 50,201,482.18 dimana nilai ekspor tahun 2023 sebesar Rp. 8,367,649.32 dan nilai impor sebesar Rp. 58,569,131.50 jika dibandingkan dengan PDRB tahun 2023 sebesar Rp. 128,523,134.13 maka rasio ekspor impor terhadap PDRB sebesar -39,06 hal ini disebabkan oleh masih banyaknya kebutuhan produk yang belum mampu diproduksi sendiri sehingga mengakibatkan besarnya nilai produk yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan di Nusa Tenggara Timur. Selain itu masih terdapat Raw Material sebagai bahan dasar produksi yang diimpor dari luar negeri untuk mendukung kelancaran proses produksi di Nusa Tenggara Timur.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis "Menguatnya Peranan NTT Dalam Perdagangan Regional" sebesar -61,90 % dengan kategori **Belum Berhasil**.

**Sasaran Strategis 6 : Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat**

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:



**Tabel 7**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Sasaran Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat**

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Rasio Ketergantungan	Orang	55,65	62,08	55,06	111,31	62,08	111,31
<b>Capaian</b>					111,31		

Sumber data: BPS NTT 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Rasio Ketergantungan**

a. **Capaian target rasio ketergantungan**

Realisasi rasio ketergantungan tahun 2022 sebesar 55,65% dari target yang ditetapkan sebesar 62,79% atau tercapai 88,62%. Kondisi ini menggambarkan setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 56 penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan di atas 65 tahun). Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, maka terjadi peningkatan sebesar 0,77%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023, rasio ketergantungan telah mencapai 89,64%

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

*Total Fertility Rate (TFR)* Provinsi NTT / jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada usia produktif di provinsi NTT tahun 2022 sebanyak 3 orang anak, hal ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk usia non produktif (15 tahun ke bawah). Kondisi ini ikut mempengaruhi rasio ketergantungan. Kedua, *Usia Harapan Hidup (UHH)* Usia Harapan Hidup NTT pada tahun 2022 sebesar 67,47 tahun, hal ini berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk usia non produktif (60 tahun keatas). Kondisi ini ikut mempengaruhi rasio ketergantungan.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis "**Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat**" sebesar 88,62% dengan kategori **Sangat Berhasil**.



## Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 8  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	75,30	71	74,3	101,78	71	71
Capaian					105,25		

Sumber data: LKIP Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Prov. NTT Tahun 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

### 1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

#### a. Capaian target pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor pola pangan harapan adalah Susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Data konsumsi pangan ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam perhitungan analisis PPH ini menggunakan Angka Kecukupan Energi anjuran sebesar 2.100 kkal dan Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram (berdasarkan AKG hasil WNPG Tahun 2018). Skor PPH tahun 2023 untuk Provinsi NTT adalah 74,3 poin dari target 71 poin jika dengan capaian kinerja 105,25 dengan kategori Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 75,3 poin menunjukkan

bahwa ada penurunan sebesar 1% disebabkan karena pola konsumsi yang belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang diakibatkan pemahaman akan pola konsumsi B2SA yang masih rendah.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Peningkatan pola pangan harapan pada tahun 2022 sangat dipengaruhi pola konsumsi energi (karbohidrat), protein, sayur dan buah.

**- Konsumsi Energi (Karbohidrat)**

Konsumsi energi penduduk NTT di tingkat rumah tangga mengalami peningkatan dari 1.918 kkal/kap/hari pada tahun 2021 menjadi 1.974 kkal/kap/hari di tahun 2022. Angka konsumsi energi ini masih rendah atau belum mencukupi apabila dibandingkan angka kecukupan energi yang ditetapkan WNPG yaitu 2.100 kkal/kap/hari, namun tergolong normal. Tetapi konsumsi energi terbesar berasal dari kelompok padi-padian yaitu beras dan terigu. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk meningkatkan konsumsi energi penduduk NTT dari komoditi sumber energi/karbohidrat dari kelompok lainnya seperti jagung, sorghum dan umbi-umbian.

**- Konsumsi Protein (Nabati dan Hewani)**

Konsumsi protein penduduk NTT di tingkat rumah tangga mengalami peningkatan dari 54,9 gram/kap/hari pada tahun 2021 menjadi 55,4 gram/kap/hari di tahun 2022. Jika dibandingkan angka kecukupan protein yang ditetapkan WNPG, yaitu 57 gram/kap/hari, maka konsumsi protein penduduk NTT masih perlu ditingkatkan. Komposisi Konsumsi Protein penduduk NTT Tahun 2022 tersebut (55,4 gram/kap/hari), terdiri dari 68,72% atau 38,07 gram Protein asal Pangan Nabati dan 31,28% atau 17,33 gram Protein asal Pangan Hewani.

**- Konsumsi Sayur dan Buah**

Konsumsi sayur dan buah penduduk NTT di tingkat rumah tangga mengalami peningkatan dari 72,0 kilogram/kap/tahun pada tahun 2021 menjadi 76,3 kilogram/kap/tahun di tahun 2022. Apabila dibandingkan angka kecukupan sayur dan buah yang ditetapkan WNPG yaitu 91,25 kilogram/kap/tahun (Sayur: 58,03

kilogram/kap/tahun dan buah: 33,22 kilogram/kap/tahun), maka konsumsi sayur dan buah penduduk NTT masih perlu ditingkatkan. Komposisi Konsumsi sayur dan buah penduduk NTT Tahun 2022 tersebut (76,3 kilogram/kap/tahun), terdiri dari 68,41% atau 52,2 kilogram/kap/tahun pangan asal sayur dan 31,58% atau 24,1 kilogram/kap/tahun asal pangan buah.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis “Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan” sebesar 109,13% dengan kategori Sangat Berhasil.

**Sasaran Strategis 8 : Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah**

Sasaran ini mencakup satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 9  
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1	Indeks Gini	Poin	0,34	0,34-0,32	0,325	104,41– 98,44	0,34 - 0,32	104,41– 98,44
Capaian						98,44		

Sumber data: BPS Provinsi NTT Tahun 2023, diolah

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Gini**

a. **Capaian Target Indeks Gini**

Indeks Gini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat di NTT. Realisasi Indeks Gini tahun 2023 sebagai tahun akhir RPJMD adalah sebesar 0,325 poin. Jika dibandingkan dengan target pesimis sebesar 0,34 poin, maka capaian Indeks Gini sebesar 104,41%. Jika dibandingkan dengan target optimis sebesar 0,32 poin maka capaian Indeks Gini sebesar 98,44%. Kondisi ini membaik 0,015 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022.



b. **Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Indeks gini tidak mengalami perubahan signifikan sejalan dengan penurunan persentase penduduk miskin yang hanya sebesar 0,09%. Permasalahan indeks gini di Provinsi NTT dipengaruhi oleh kondisi disparitas antar wilayah. Disparitas antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi, dalam rentang waktu Maret 2022 – Maret 2023, kemiskinan di perkotaan naik sebesar 0,28% poin dari 8,84% menjadi 9,12%. Sebaliknya, kemiskinan di perdesaan turun 0,1% poin, dari 23,86% menjadi 23,76%.

Sesuai penjelasan di atas, rata-rata capaian sasaran strategis **"Berkurangnya ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah"** sebesar 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

**Sasaran Strategis 9 : Terjaminnya Keadilan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak**

Sasaran ini mencakup empat indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 10  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	96,47	95	NA	NA	95	NA
2.	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	74,53	74,76	NA	NA	74,76	NA
3.	Persentase Kekerasan Terhadap Anak Yang Tertangani	%	92,72	100	100	100	100	100
4.	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	%	98,34	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian						100		

Sumber data: LKIP DP3A Prov.NTT Tahun 2023

**A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:**

**1. Indeks Pembangunan Gender**

**a. Capaian Target Indeks Pembangunan Gender**

Realisasi Indeks Pembangunan Gender tahun 2022 sebesar 96,47% dari target yang ditetapkan sebesar 95% atau tercapai 101,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 3,84%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Gender telah mencapai 92,72%.

**b. Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Angka Harapan Hidup yang semakin membaik, peningkatan cakupan pendampingan gender dan adanya Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

**2. Indeks Pemberdayaan Gender**

**a. Capaian Target Indeks Pemberdayaan Gender**

Capaian target indeks pemberdayaan gender adalah realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022 sebesar 74,53% dari target yang ditetapkan sebesar 74,53% atau tercapai 100%. Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023, Indeks Pemberdayaan Gender telah mencapai 92,72%.

**b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen.

**3. Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Tertangani**

**a. Capaian Target Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Tertangani**

Realisasi persentase kasus kekerasan terhadap anak yang tertangani tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau tercapai 100%. Total kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani yaitu 561 kasus dari 561 kasus yang tercatat. Jika dibandingkan dengan target



akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 100% telah mencapai 100%.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Meningkatnya penyelesaian atas berbagai kasus kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan anak. Kesadaran tersebut timbul akibat masyarakat menyadari anak memiliki hak asasi yang sama di antaranya hak memperoleh kehidupan dan perlakuan yang adil, tidak ada intimidasi atau mengalami kekerasan fisik maupun non fisik.
2. Pembentukan UPTD PPA Provinsi NTT yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTT nomor 49 tahun 2022 tentang susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja cabang dinas dan UPTD, turut menyumbang kontribusi terhadap penyelesaian berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Adapun bentuk penanganan kasus kekerasan yang dilakukan UPTD antara lain :
  - a. Mediasi
  - b. Konseling
  - c. Pendampingan bagi para Pengadu dan saksi oleh pendamping, konselor hukum dan para legal terhadap kasus yang diteruskan ke ranah hukum termasuk pendampingan terhadap Pengadu yang dirujuk ke Rumah Sakit atau unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda NTT dan Pusat Krisis Terpadu di Rumah Sakit Umum W.Z. Yohanes Kupang
  - d. Penampungan sementara: Pengadu yang membutuhkan perlindungan akan ditampung pada rumah aman/shelter di UPTD PPA Provinsi NTT
  - e. Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan
  - f. Fasilitasi pembuatan *visum et repertum*
  - g. Pelayanan kerohanian : untuk memberikan pencerahan bagi Teradu/ Pelaku dan juga Pengadu/ Korban dengan disaksikan oleh anggota keluarga dan anak-anak agar mereka dapat dipersatukan kembali dalam suasana damai.



- h. Pelayanan psikologis
  - i. Rujukan kasus
  - j. Penjangkauan Pengadu/ Korban
  - k. Penjangkauan Teradu/ Pelaku.
3. Program Pembangunan desa/kelurahan layak anak dan pembentukan satgas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di setiap kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, Kepolisian, TNI dan berbagai lembaga non Pemerintah pemerhati anak.
4. **Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Tertangani**
- a. **Capaian target persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani**
- Realisasi persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani tahun 2023 sebesar 100% 98,34% dari target yang ditetapkan sebesar 100% 80% atau tercapai 122,93%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 98,34%, terjadi peningkatan sebesar 1,66%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023, persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan telah mencapai 100%.
- b. **Faktor- faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**
- Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan sesuai *standard operasional procedure* (SOP) yang berlaku. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid menggunakan aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Angka penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem pencatatan dan pelaporan SIMFONI PPA. Angka kekerasan terhadap perempuan yang dicatatkan melalui SIMFONI PPA ini cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu pada tahun 2021 sebanyak 412 kasus, tahun 2022 sebanyak 603 kasus dan tahun 2023 sebanyak 1026 kasus. Realisasi indikator cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah 100% mencapai target yang ditetapkan. Untuk total kasus kekerasan yang ditangani yaitu 1026 dari 1026 kasus yang tercatat dalam

SIMFONI PPA (data 31 Desember 2023). Hal ini dapat dilihat sebagai adanya peningkatan kekerasan di lapangan, namun dapat juga dipahami sebagai meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di sekitar mereka, peran UPTD PPA Provinsi NTT yang memberikan semakin luasnya jangkauan informasi dan layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta juga meningkatnya pencatatan yang dilakukan oleh operator SIMFONI di kabupaten/kota.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian misi **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”** sebesar 92,75 % dengan Kategori **Sangat Berhasil**.

**B. Analisis dukungan Program dan Anggaran dalam pencapaian Misi**

Keberhasilan Misi satu : **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”** didukung oleh 40 (empat puluh) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.212.529.483,- (seratus empat puluh satu milyar dua ratus dua belas juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 122.357.676.998,- (seratus dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah) atau 86,65%

Tabel 11  
Rincian Program, Anggaran dan Realisasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD (Rp)	REALISASI
<b>MISI I</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	662,000,000	359,831,750
2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13,927,671,505	10,172,393,934
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17,015,773,000	14,081,044,791
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316,260,160	185,674,398
5	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3,347,563,900	3,140,421,260
6	Pengelolaan Perikanan Tangkap	24,335,071,000	23,230,152,800
7	Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,832,158,119	1,665,646,350
8	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2,314,896,800	2,138,930,260
9	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	121,838,158	60,000,000

10	Penempatan Tenaga Kerja	753,397,800	217,367,400
11	Hubungan Industrial	249,999,400	22,231,450
12	Pengawasan Ketenagakerjaan	149,999,100	0
13	Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	9,277,459,600	6,129,834,780
14	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	1,264,000,000	762,501,240
15	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	424,999,300	51,114,460
16	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	299,999,900	99,925,880
17	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	474,999,648	92,010,320
18	Penataan Desa	44,132,080	31,188,100
19	Administrasi Pemerintah Desa	529,622,800	133,529,000
20	Promosi Penanaman Modal	150,000,000	137,863,000
21	Pelayanan Penanaman Modal	315,052,280	115,738,375
22	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	818,400,000	773,013,534
23	Pemberdayaan Sosial	1,537,999,900	1,348,199,900
24	Rehabilitas Sosial	10,813,143,974	8,785,345,253
25	Perlindungan dan Jaminan Sosial	34,206,489,200	18,598,191,650
26	Penanganan Bencana	2,210,008,800	1,558,205,525
27	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,832,158,119	1,244,722,223
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2,314,896,800	1,201,514,731
29	Penelitian dan Pengembangan Daerah	121,838,158	330,896,440
30	Pengelolaan Barang Milik Daerah	753,397,800	1,216,930,374
31	Pengelolaan Pendapatan Daerah	662,000,000	13,950,064,400
32	Perlindungan Perempuan	317,042,000	262,126,180
33	Perlindungan Khusus Anak	91,528,000	79,214,400
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>225,485,335,831</b>	<b>3,399,267,399</b>

Sumber: LKIP Perangkat daerah Provinsi NTT tahun 2022

**Misi 2 : MEMBANGUN NTT SEBAGAI SALAH SATU GERBANG DAN PUSAT PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (RING OF BEAUTY)**

Pariwisata merupakan masa depan ekonomi karena mempunyai *multiplier-effect*. NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata. NTT merupakan provinsi dengan destinasi unggulan terbanyak dan menjadi destinasi super prioritas di Indonesia, sehingga menjadi pilihan utama wisata dunia.. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional. NTT yang kaya akan aset alam dan budaya dengan 1.192 pulau dan 1.378 destinasi wisata dengan



segala otentisitas keunikannya baik daratan maupun perairan merupakan rangkaian cincin keindahan (*ring of beauty*). Untuk itu Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Pariwisata sebagai *prime mover* (penggerak utama) pembangunan ekonomi. Kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, obyek dan daya tarik wisata serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah dan keberagaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Keberhasilan pengembangan kepariwisataan dapat diukur dari jumlah kunjungan wisatawan. Misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama ekonomi dalam mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera. Misi ini didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

**Sasaran Strategis 1 : Pengembangan Pariwisata NTT Melalui Pemenuhan Unsur 5A Pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accomodation, Amenities dan Awareness*) Dengan Pola Pendekatan Kawasan**

Sasaran ini mencakup 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,62	0,78	0,66	84,62	0,78	84,62
2.	Share Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	12,05	12,23	12,52	102,37	12,23	102,37

3.	Share Lapangan Usaha Jasa Lainnya terhadap PDRB	%	1,87	2,45	1,65	67,35	2,45	67,35
Rata-rata Capaian Sasaran						84,78		

Sumber : BPS NTT 2023 diolah

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB**

a. **Capaian Target capaian share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB**

Pada tahun 2023 target kontribusi / share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 0,78%, dengan realisasi sebesar 0,66% sehingga capaiannya 84,62%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 0,62% maka terjadi peningkatan sebesar 0,16%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,78% maka capaiannya sebesar 84,62% atau terjadi gap sebesar 0,16%.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Meskipun obyek pariwisata di Provisni NTT sempat ditutup selama hampir 2 (dua) tahun sebagai dampak dari pandemi Covid '19 namun secara perlahan geliat pariwisata di NTT mulai hidup kembali walaupun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB khususya berkaitan dengan kontribusi / share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan ke Provinsi NTT. Dampak positif dari peningkatan kunjungan wisatawan adalah meningkatnya kontribusi / share lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB di Provinsi NTT.

2. **Share Sektor Perdagangan terhadap PDRB**

a. **Capaian target share sektor perdagangan terhadap PDRB**

Pada tahun 2023, realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 12,52% atau setara Rp. 16.091.107,79 Juta dari target 12,23% atau setara Rp.



128.523.134,13 atau mencapai 102,37%. Jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2022 sebesar 12,05% maka terjadi kenaikan sebesar 0,18%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 12,23 % maka capaiannya sebesar 102,37%. (melampaui target akhir RPJMD).

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 ditopang oleh tetap kuatnya kinerja sebagian besar usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sektor perdagangan yang memberikan kontribusi signifikan, adalah pertumbuhan pada perdagangan besar dan eceran termasuk penjualan kendaraan bermotor. Maraknya penjualan online yang digunakan oleh masyarakat NTT dalam memperdagangkan usahanya turut berkontribusi terhadap peningkatan PDRB. Selain itu terdapat faktor yang dapat menghambat pertumbuhan pedagangan yakni meningkatnya harga barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting pada saat tertentu dikarenakan kelangkaan persediaan.

Tabel 13  
PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.676.518,62
2	Pertambangan dan Penggalian	1.344.110,15
3	Industri Pengolahan	1.687.747,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	116.794,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	72.187,70
6	Konstruksi	13.562.172,41
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.091.107,79
8	Transportasi dan Pergudangan	6.515.364,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	851.740,04
10	Informasi dan Komunikasi	8.965.971,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.607.232,06
12	Real Estate	3.056.603,76
13	Jasa Perusahaan	190.966,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.944.265,67
15	Jasa Pendidikan	11.442.148,40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.273.676,44
17	Jasa lainnya	2.124.526,68
	Total PDRB	128.523.134,13

Sumber Data : BPS Provinsi NTT 2023 diolah



### 3. Share Lapangan Usaha Jasa Lainnya terhadap PDRB

#### a. Capaian target share lapangan usaha jasa lainnya terhadap PDRB

Pada tahun 2023, target share lapangan usaha jasa lainnya terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 2,45% dengan realisasi sebesar 1,65 %, sehingga capaiannya sebesar 67,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1,65% maka terjadi penurunan sebesar 0,02%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,45 maka capaiannya sebesar 67,175% atau terjadi gap sebesar 0,8%.

#### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Kategori jasa lainnya merupakan gabungan 4 (empat) kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: kesenian, hiburan, dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan; jasa swasta lainnya termasuk kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD. Pandemi Covid'19 berdampak terhadap dunia usaha dimana banyak usaha termasuk tempat hiburan, rekreasi terpaksa harus ditutup sebagai akibat dari maraknya penyebaran Covid-19. Kondisi ini berdampak terhadap menurunnya kontribusi dunia usaha terhadap PDRB.

### B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yakni: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 14

Rincian Program, Anggaran dan Realisasi Tahun 2023

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Perangkat Daerah
1.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	371.428.620	163.762.365	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



2.	Stabilisasi Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	524.999.700	135.324.200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	591.246.230	99.054.080	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1.000.000.000	635.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	732.651.800	83.756.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	<b>Jumlah</b>	<b>3,220,526,350</b>	<b>1,096,896,665</b>	

Sumber: LKIP Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif dan Dinas Perindag Tahun 2023

## Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Sumbangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah

Sasaran ini mencakup 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Pertumbuhan UKM dan IKM di daerah wisata	%	48,64	8	25,45	318,13	8	318,13
2.	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,02	4	2,01	50,25	4	50,25
3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1,534,144	1,634,144	1,624,891	99,39	1,634,144	99,39
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>						<b>155,92</b>		

Sumber data: LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2023

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

### 1. Pertumbuhan UMKM dan IKM di Daerah Pariwisata

- a. **Capaian target pertumbuhan UMKM dan IKM di daerah pariwisata**  
Pada tahun 2023, realisasi pertumbuhan UMKM dan IKM di daerah pariwisata sebesar 25,45% dari target sebesar 8% sehingga capaiannya 318,13%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

sebesar 48,64%, maka realisasi tahun 2023 lebih rendah. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 8%, maka capaiannya 318,13% atau melampaui target.

Tabel 16  
Data Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata Tahun 2023

NO	SUB SEKTOR	JUMLAH	PRODUK YANG DIHASILKAN
1.	Kuliner	1.474	Pengolahan se'i, madu, garam, abon ikan, keripik ikan, keripik jagung, kacang, jagung tifi pulut, emping jagung, olahan berbahan dasar kelor, makanan lokal oleh-oleh, kue rambut, keripik ubi, keripik abon, sopi dan gula air
2.	Kriya	1383	Tenun ikat, cinderamata, aksesoris, selendang, tungku arang, potbunga, meja, anyaman ti'i langga, gong, sasando, biola
3.	Fashion	155	Kabaya, pakaian pengantin, salon dan butik tata risapengantin
4.	TV dan Radio	46	Saluran TV dan Radio
5.	Penerbitan	85	Majalah dan Percetakan
6.	Musik	21	Grup Band dan Penyanyi
7.	Arsitektur	60	Arsitek yang memiliki SKA dan jasa desain arsitektur
8.	App & Games	22	Pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce) dan aplikasi pemrograman komputer
9.	Periklanan	1	Usaha jasa periklanan pada website
10.	Fotografi	31	Studio foto dan komunitas fotografer
11.	DKV	24	Desain grafis dan aktivitas pasca produksi film dan video
12.	Seni Pertunjukan	305	Seni tari, musik, teater dan seni tradisional
13.	Desain Produk	110	Desain kartu undangan, kartu nama, brosur, papan reklame, stempel, usaha sablon, dan pamflet
14.	Seni Rupa	41	Seni patung, seni keramik, sablon, permainan anak-anak, lukis dan anyaman
15.	Film, Animasi, Video	12	Produksi media rekaman film dan video, serta aktivitas film dan video lainnya
16.	Desain Interior	2	Desain interior untuk rumah

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023



**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Salah satu kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah adalah bertumbuhnya UMKM dan IKM di daerah wisata. Tahun 2022 menjadi awal kebangkitan sektor pariwisata pasca pandemi covid'19. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke berbagai daerah tujuan wisata di NTT maka sektor UMKM dan IKM di daerah tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Meningkatnya pertumbuhan UMKM dan IKM tersebut menandai kebangkitan usaha ekonomi kreatif setelah kurang lebih 2 tahun mengalami kelesuan. Trend pertumbuhan ini diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun mengalami pertumbuhan, namun tantangan industri pariwisata saat ini adalah bagaimana meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan pasca pandemi sehingga dapat membantu keadaan ekonomi Negara. Beberapa sektor penunjang pariwisata yang perlu mendapat perhatian khusus adalah sektor akomodasi (hotel dan penginapan), sektor penyediaan makan minum (restoran dan rumah makan), penyediaan souvenir dan belanja , sektor transportasi dan sektor hiburan. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari UMKM dan IKM yang bisa menghasilkan produk-produk lokal yang berkualitas untuk dipasarkan.

**2. Lama Tinggal Wisatawan**

**a. Capaian Target Lama Tinggal Wisatawan**

Target lama tinggal wisatawan di NTT tahun 2023 selama 4 hari dengan realisasi 2,01 hari sehingga capaiannya 50,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 2,02 hari maka terjadi penurunan 0,01 hari. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 selama 4 hari maka terjadi gap sebesar 1,99 hari atau 49,75%.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Indikator kinerja**

Lama tinggal wisatawan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan keberhasilan suatu daerah memanfaatkan sektor wisata sebagai peluang perkembangan ekonomi. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwasanya

tahun 2022 merupakan tonggak penting dimulainya kembali aktivitas di sektor pariwisata. Pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan ke NTT meningkat secara signifikan. Meskipun jumlah kunjungan wisata meningkat namun tidak berbanding lurus dengan lama tinggal wisatawan. Dampaknya adalah lama kunjungan wisatawan yang diharapkan bisa mencapai 4 hari hanya mencapai 2,01 hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lama tinggal wisatawan di NTT tidak mencapai target 4 hari adalah:

- Produk pariwisata Nusa Tenggara Timur mahal namun kualitasnya "rendah" artinya dalam pengembangan pariwisata para pengelola pariwisata tidak memperhatikan kebutuhan pengunjung dan tidak mempertimbangkan selera pasar yang potensial.
- Ada atraksi alam, budaya dan buatan manusia namun ketersediaan ini tidak disuguhkan dan dipresentasikan dengan benar dan profesional sehingga pengunjung merasa bosan dan tidak tercipta kepuasan.
- Terbatasnya Aksesibilitas.  
Akses dari daerah asal menuju daerah tujuan wisata sangat mudah dijangkau baik lewat darat, laut dan udara tetapi ketika menuju ke obyek wisata, pengunjung sangat susah mendapatkan transportasi kecuali transportasi pribadi. Informasi perjalanan wisata, penginapan dan rumah makan khususnya di destinasi obyek wisata sangat terbatas, tidak tersedianya leaflet, brosur dan buku panduan menyebabkan lama menginap dan frekuensi berkunjung wisatawan terbatas.
- Rendahnya mutu pelayanan, persaingan yang tidak sehat di antara para penyelenggara pariwisata serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya perlindungan pengunjung, kurangnya modal dan rendahnya sumberdaya manusia, terutama tenaga yang terampil dan profesional dalam hal manajerial di bidang pariwisata.
- Kebersihan dan kesehatan lingkungan obyek wisata kurang diperhatikan (sampah berserakan), adanya penebangan pohon di sekitar pantai menyebabkan degradasi lahan, pemahaman masyarakat tentang pariwisata dan wisatawan sangat sempit sehingga kepedulian terhadap kenyamanan, keamanan dan kebersihan kurang diperhatikan.

### 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan

#### a. Capaian Target Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan di NTT sebanyak 1.624.149 orang dari target 1,634,144 orang sehingga capaiannya sebesar 99,39%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 1.534.144 orang maka terjadi kenaikan 90.837 orang. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 1,634,144 maka capaiannya sebesar 99,39 %. Dengan demikian terdapat gap sebesar 0,61% dari target akhir RPJMD.

#### b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Salah satu variabel untuk mengukur keberhasilan sektor pariwisata di suatu daerah adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Tantangan industri pariwisata pasca pandemi covid'19 sejak Tahun 2022 hingga 2023 adalah bagaimana cara meningkatkan kembali jumlah kunjungan wisatawan pasca pandemi covid-19. Sejak tahun 2023 kunjungan wisatawan ke NTT mengalami yang kenaikan sangat signifikan. Hal ini seiring dengan berakhirnya pademi covid'19 sehingga sektor pariwisata mulai bangkit kembali.

### B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 17  
Program, kegiatan dan anggaran

No	Perangkat Daerah	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi
1.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	446.134.000	152.311.800
2.	Dinas Pariwisata dan Ekonmi Kreatif	Pemasaran Pariwisata	949.756.800	60.000.000
		<b>Jumlah</b>	<b>1.395.890.800</b>	<b>212.313.800</b>

Sumber data: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023

Sesuai penjelasan di atas maka rata-rata capaian misi "**Membangun NTT sebagai salah satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring of**



Beauty)” sebesar 120,35% dengan Kategori **Sangat Berhasil** yang didukung dengan 2 (dua) sasaran dan 7 (tujuh) program dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.616.417.150 dan realisasi sebesar Rp. 1.309.210.465 atau mencapai 28,36%.

**Misi 3 : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial, ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolasi.

Misi ini didukung oleh 9 (sembilan) sasaran strategis yaitu:

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah di Dalam Daerah dan Keluar Daerah**

Sasaran ini, mencakup tiga (3) indikator sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	85,12 (2.255,18 Km)	100 (2.650 Km)	73,25 (1.941,125 Km)	73,25 (1.941,125 Km)	100 (2.650 Km)	73,25 (1.941,125 Km)
2.	Dwealing Time Pelabuhan	hari	4	3	3	100	3	100
3.	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat	%	31,59	74,81	17,76	23,74	74,81	23,74
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>						<b>65,66</b>		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, LKIP Dinas Perhubungan Provinsi NTT, 2023 diolah

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. **Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap**

a. **Capaian Target Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap**



Pada tahun 2023 target persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap 2.650 Km atau 100%, realisasi 1.941,125 Km atau 73,25%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 2.255,818 Km atau 85,12%, maka panjang jalan provinsi kondisi mantap sampai tahun 2023 berkurang sebesar 314,693 Km. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 2.650 Km atau 100% maka panjang jalan provinsi kondisi mantap berkurang 708,875 Km.

- b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**  
Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap belum mencapai target, adapun kendala yang menyebabkan belum tercapainya target 100% mantap jalan antara lain disebabkan, karena :

1. Kondisi mantap jalan berdasarkan survey kondisi jalan Tahun 2023 mengalami penurunan oleh karena tidak adanya kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi jalan yang harusnya dilakukan setiap tahunnya.
2. Adanya kenaikan BBM dan Aspal yang mempengaruhi kemampuan keuangan penyedia jasa dalam penyelesaian pekerjaan di lapangan.
3. Ruas jalan Provinsi sebagian besar berada pada wilayah perbukitan yang hampir setiap tahun terjadi curah hujan yang tinggi yang menyebabkan longsor, dll.
4. Terjadinya peningkatan volume lalu lintas serta bertambahnya kendaraan bertonase tinggi menyebabkan over load yang diterima jalan.

## 2. ***Dwealing Time* Pelabuhan**

### a. **Capaian Target *Dwealing Time* Pelabuhan**

Pada tahun 2023 target *dwealing time* pelabuhan yaitu 3 hari, realisasi 3 hari. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 4 hari, maka realisasi *dwealing time* pelabuhan pada tahun 2023 lebih baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 yaitu

3 hari maka capaiannya sebesar 100 %.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator kinerja Dwealing time pelabuhan memenuhi target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2023, yaitu :

1. Pengawasan di pelabuhan khususnya kegiatan bongkar/muat (dwealing time) dengan penambahan anggaran pada kegiatan pengawasan sehingga tidak menimbulkan kemacetan atau mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat pengguna serta menimbulkan biaya yang semakin tinggi bagi masyarakat pengguna karena lamanya waktu bongkar/muat di pelabuhan.
2. Menjaga komunikasi dengan petugas-petugas yang berada di pelabuhan dan UPT Kementerian yang memiliki wilayah kerja di pelabuhan target serta BUMN penyelenggara kegiatan bongkar/muat peti kemas di pelabuhan agar kegiatan pelayanan tetap berjalan dengan baik.

3. **Cakupan Pelayanan Angkutan Darat**

a. **Capaian target Cakupan Pelayanan Angkutan Darat**

Pada tahun 2023 target cakupan pelayanan angkutan darat sebesar 74,81% atau 446 trayek, dengan realisasi sebanyak 106 trayek atau 17,76%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 14,41% atau 86 trayek, maka realisasi cakupan pelayanan angkutan darat tahun 2023 mengalami peningkatan 3,35% atau sebanyak 20 trayek. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebanyak 74,81% atau 446 trayek maka capaiannya sebesar 17,76% atau 106 trayek.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Indikator cakupan pelayanan angkutan darat merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas Pehubungan Provinsi NTT tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 sebanyak 597 trayek AKDP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 111 Tahun 2019



namun sampai dengan Tahun 2023 trayek-trayek yang ditetapkan belum dilayani oleh angkutan baik perintis maupun eksekutif. Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan realisasi jumlah trayek yang dilayani oleh angkutan umum AKDP sebanyak 106 trayek belum memenuhi target yang ditetapkan Tahun 2023 sebanyak 446 trayek. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2023, yaitu : pemerintah harus lebih banyak memberikan perhatian dalam bentuk penambahan jumlah anggaran pada kegiatan-kegiatan ini sehingga ketersediaan angkutan umum dalam rangka pemerataan pelayanan transportasi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dapat dijangkau, murah dan terselenggara dengan baik.

**B. Analisis program, anggaran dan perangkat daerah yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah di Dalam Daerah dan Luar Daerah, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 3 program pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perhubungan. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 19**  
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)  
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Penyelenggaraan Jalan	153.405.817.29 2	137.319.368.682	89,51
2.	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	500.665.097	497.185.250	99,30
		Program Pengelolaan Pelayaran	6.339.690.000	5.425.746.163	85,58

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran strategis

“Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah di Dalam Daerah dan Keluar Daerah” sebesar 65,66%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 2 program oleh 2 perangkat daerah Daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.752.162.389,- dan realisasi sebesar Rp. 143.242.300.095,- atau mencapai 86,94%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT cukup berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

**Sasaran Strategis 2 : Tersedianya Infrastruktur Pengairan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian**

Sasaran ini didukung satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 20  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Bagi Petani	%	57,96	100	0,30	58,26	78,46	58,26
Capaian Sasaran					58,26		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, 2023

A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Bagi Petani

a. **Capaian Target Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Bagi Petani**

Pada tahun 2023 target persentase pembangunan jaringan irigasi bagi petani sebesar 100% atau 60.328 Ha, dengan realisasinya sebesar 0,30% atau 183,89 Ha. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 57,96% atau 34.963,58 Ha , maka capaian persentase pembangunan jaringan irigasi bagi petani sampai tahun

2023 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 78,46% maka capaiannya sebesar 58,26% atau 35.147,47 Ha.

- b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**  
Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian pelaksanaan kegiatan baik melalui pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin yang dilakukan dalam tahun 2023 ini masih jauh dari apa yang diharapkan terhadap upaya untuk mencapai kondisi kinerja pelayanan jaringan irigasi yang optimal dan dalam kondisi baik (<70%) dari semua Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2023, yaitu : melalui pemeliharaan berkala pada jaringan irigasi pada 3 DI dan kegiatan pemeliharaan rutin pada 18 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota dengan total luas pengaruh terhadap luas fungsional sebesar 8.980 Ha.

Adapun jenis rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di Tahun 2023 meliputi :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Wanokaka (2.635 Ha) di Kabupaten Sumba Barat (DAK).
2. Pemeliharaan Berkala D.I. Cancar di Kabupaten Manggarai.
3. Pemeliharaan Berkala D.I. Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat.
4. Pemeliharaan Berkala D.I. Weliman di Kabupaten Malaka.
5. Pemeliharaan Rutin D.I di Kabupaten Belu.
6. Pemeliharaan Rutin D.I di Kabupaten Kupang.
7. Pemeliharaan Rutin D.I di Kabupaten Malaka.
8. Pemeliharaan Rutin D.I di Kabupaten Manggarai.
9. Pemeliharaan Rutin D.I di Kabupaten Manggarai Barat.
10. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Flores Timur.
11. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Manggarai Timur.
12. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagekeo.



13. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Ngada.
14. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Barat
15. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Barat Daya.
16. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten Sumba Timur.
17. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten TTS.
18. Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi di Kabupaten TTU.

**B. Analisis Program Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung peningkatan produksi pertanian, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 1 Program pada tahun 2023, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.310.616.860.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.779.009.906,- atau mencapai 58,44%.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis "Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung peningkatan produksi pertanian" sebesar 58,26%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT Cukup Berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi**

Sasaran ini mencakup 3 (tiga ) indikator sebagai berikut:

**Tabel 21**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			Indikator Kinerja	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Penambahan Rumah Layak Huni	Unit	Tidak dilaksanakan	-	-	26,63	47,948	26,63



2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak	%	Tidak dilaksanakan	-	-	69,82	100	69,82
3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	Tidak dilaksanakan	-	-	90,52	100	90,52
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>						<b>62,32</b>		

Sumber data: LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, 2023

**A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:**

**1. Penambahan Rumah Layak Huni**

**a. Capaian Target Penambahan Rumah Layak Huni**

Pada tahun 2023 target penambahan rumah layak huni tidak dilaksanakan. Penanganan RTLH tidak dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023. Data terakhir tahun 2019 jumlah penanganan RTLH adalah 12.773 yang merupakan akumulasi penanganan secara kolaboratif melalui sumber dana APBN maupun APBD. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebanyak 47.948 unit maka capaiannya sebesar 12.773 unit atau 26,63%.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator penambahan rumah layak huni belum mencapai target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2023, yaitu :

1. Indikator penambahan rumah layak huni merupakan indikator kinerja baru yang disesuaikan menjadi indikator utama pada perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2019-2023.
2. Capaian penambahan rumah layak huni tahun 2023 tidak dilaksanakan. Hal ini karena penanganan rumah layak huni dilakukan dan direalisasikan hanya sampai tahun 2019 dengan jumlah rumah terbangun sebanyak 403 unit. Selanjutnya mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak dilakukan karena

keterbatasan anggaran.

3. Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 maka indikator yang berkaitan dengan penyediaan rumah difokuskan pada penyediaan rumah korban bencana dan penyediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

## 2. **Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak**

### a. **Capaian Target Persentase Rumah Tangga Menurut Air Layak**

Pada tahun 2023 target persentase rumah tangga menurut air layak tidak dilaksanakan. Capaian persentase rumah tangga menurut air layak sampai dengan tahun 2022 sebesar 59,35% atau 11.726 KK. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 100%, maka capaiannya sebesar 69,82%.

### b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator persentase rumah tangga menurut air layak belum dapat dilakukan pada tahun 2023 oleh karena keterbatasan anggaran.

## 3. **Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak**

### a. **Capaian Target Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak**

Pada tahun 2023 target persentase rumah tangga menurut sanitasi layak tidak dilaksanakan. Penanganan rumah tangga menurut sanitasi layak tidak dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Data terakhir tahun 2021 jumlah penanganan rumah tangga menurut sanitasi layak adalah 90,52%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 100% maka capaiannya sebesar 90,52%.

### b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator persentase rumah tangga menurut sanitasi layak belum dapat dilakukan pada tahun 2023 oleh karena keterbatasan anggaran.



## B. Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 1 Program pada tahun 2023, yaitu Program Pengembangan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.005.925.108,- dan realisasi sebesar Rp. 64.672.860.326,- atau mencapai 92,38%.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Perumahan Layak, Air Minum dan Sanitasi" sebesar 62,32%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT cukup berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

### Sasaran Strategis 4 : Terlaksananya Percepatan Pembangunan Elektrifikasi

Sasaran ini didukung satu indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 22  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Rasio Elektrifikasi	%	92,72	85	94,89	111,63	85	111,63
Capaian Sasaran					111,63		

Sumber data: BPS Provinsi NTT, 2023. Diolah

A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Rasio Elektrifikasi

##### a. Capaian Target Rasio Elektrifikasi

Target Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 sebesar 85%, dengan realisasinya sebesar 94,89% atau mencapai 111,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 92,72%, maka

realisasi Rasio Elektrifikasi di tahun 2023 meningkat sebesar 2,17 poin. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD sebesar 85%, maka realisasi Rasio Elektrifikasi di tahun 2023 lebih besar 9,89 poin, dengan capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 111,63%.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator rasio elektrifikasi telah mencapai target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan energi listrik khusus bagi masyarakat tidak mampu/miskin melalui kerjasama dengan PLN.
2. Dilakukan verifikasi dan sinkronisasi data antara Dinas ESDM dengan BAPPENAS yaitu terkait data 3T dan kementerian Sosial terkait DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang nantinya menjadi rujukan untuk Dinas ESDM melaksanakan hibah bantuan meteran gratis bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Nusa Tenggara Timur.
3. Adanya dukungan dari kementerian ESDM dalam meningkatkan rasio elektrifikasi melalui PLTS Terpusat off great
4. Adanya dukungan dari mitra strategis dalam meningkatkan rasio elektrifikasi.

B. **Analisis program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

Pada tahun 2023 tidak dialokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sesuai penjelasan terkait capaian rasio elektrifikasi tahun 2023, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis "**Terlaksananya percepatan pembangunan elektrifikasi**" sebesar 111,63%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT **Sangat Berhasil** mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.



## Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Sasaran ini didukung satu indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 23  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,49	75,66	74,18	98,04	75,66	98,04
Capaian Sasaran					98,04		

Sumber data: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2023

### A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

##### a. Capaian Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Pada tahun 2023 target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,66 poin, realisasi sebesar 74,18 poin. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 73,49 poin, maka capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2023 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 75,66 poin maka capaiannya sebesar 98,04%.

##### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah mencapai target, adapun upaya yang dilakukan dicapai melalui seluruh kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang secara jangka panjang akan memberikan dampak peningkatan kualitas lingkungan. Beberapa kegiatan yang dimaksud berupa :

1. Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 407 hektar yang tersebar di seluruh Provinsi NTT.
2. Pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 yang telah mengolah

8,814 Kg Limbah B3.

3. Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan yang dilaksanakan di 22 kabupaten/kota.
4. Perlindungan dan pengawasan hutan pada 22 kabupaten / kota.
5. Penerbitan rekomendasi ijin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah memberikan rekomendasi ijin lingkungan kepada 23 unit/badan/usaha/kegiatan.
6. Dan kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan.

Dari seluruh kegiatan tersebut yang tidak terakomodir berupa pengukuran dan pengujian parameter uji untuk air, udara dan air laut. Dikarenakan hal inilah maka pengukuran baru dapat dilaksanakan setelah data pada tiap parameter uji untuk penghitungan IKLH telah di dapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### B. Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 1 Program pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 24  
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)  
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	501.270.000,-	427.051.974,-	85,19

Sumber data: LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT, 2023

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah" sebesar 98,04%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT **Sangat Berhasil** mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

## Sasaran Strategis 6 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca

Sasaran 6 mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 25  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO <sub>2</sub> <sup>eq</sup>	8.917.093,4	17.248.829	9.661.576,9	143,98	17.248.829	143,98
Capaian Sasaran					143,98		

Sumber data: Aplikasi AKSARA, PPRK Bappenas, 2022

### A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

#### 1. Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca

##### a. Capaian Target Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca

Pada tahun 2023 Target Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 17.248.829 Ton CO<sub>2</sub><sup>eq</sup>, realisasi sebesar 9.661.576,9 Ton CO<sub>2</sub><sup>eq</sup>. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 8.917.093,4 Ton CO<sub>2</sub><sup>eq</sup>, maka capaian Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2023 mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 17.248.829 Ton CO<sub>2</sub><sup>eq</sup> maka capaiannya sebesar 143,98%.

##### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Emisi Gas Rumah Kaca dipengaruhi oleh 5 (lima) sektor penyumbang emisi GRK yaitu sektor Kehutanan, Limbah, Energi, Pertanian dan IPPU (Industry Processor and Product Use). Perhitungan tingkat emisi GRK melalui kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dapat dihitung dengan menginput beberapa data aktivitas dari masing-masing sektor melalui aplikasi SIGN SMART (Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas dan Transparan) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**B. Analisa Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 2 Program pada tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengelolaan Hutan. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 26**  
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)  
menurut Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Persampahan	Tidak ada anggaran	-	-
		Program Pengelolaan Hutan	3.741.551.000,-	3.741.551.000,-	100

Sumber: LKIP dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis "Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca" sebesar 143,98%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT **Sangat Berhasil** mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

**Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penataan Ruang**

Sasaran 7 (tujuh) mencakup indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 27**  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang	%	Tidak dilaksanankan	-	-	26,92	100	26,92
<b>Capaian Sasaran</b>					<b>26,92</b>		

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023



**A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:**

**1. Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang**

**a. Capaian Target Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang**

Pada tahun 2023 target Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang tidak dilaksanakan. Penanganan kesesuaian fungsi struktur dan pola ruang sudah tidak dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penanganan Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang melalui Program/Kegiatan Penyusunan RTR KSP, dengan target penanganan tahun 2019 adalah 1 buah KSP dengan realisasi sebesar 1 buah KSP dengan total capaian menjadi 3 KSP (11,53 %). Demikian juga pada tahun 2020 dilakukan penanganan dengan target sebanyak 4 KSP, realisasi sebanyak 4 KSP dengan total capaian pada tahun 2020 menjadi 26,92%. Jika capaian Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 100% maka capaiannya sebesar 26,92%.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Capaian Indikator Sasaran Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang Tahun 2023 tidak dilaksanakan dikarenakan sudah tidak ada lagi kegiatan terkait penanganan KSP sampai dengan Tahun 2023, berkaitan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menetapkan bahwa seluruh kewenangan Provinsi di bidang kesesuaian fungsi struktur dan pola ruang di hapus sehingga tidak ada lagi kegiatan terkait penanganan kesesuaian fungsi struktur dan pola ruang.

**B. Analisis Program, Anggaran (alokasi dan realisasi) dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu terwujudnya



perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang, Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi kegiatan terkait penanganan Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang” sebesar 26,92%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT belum berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

**Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perbatasan Negara**

Sasaran 8 (delapan) mencakup capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 28

Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	Tidak dilaksanakan	-	-	-	90	-
<b>Capaian Sasaran</b>					-		

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2023

**A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :**

**1. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

**a. Capaian Target Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pada tahun 2023 target Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang tidak dilaksanakan. Jika capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2023 sebesar 90% maka capaiannya sebesar 0%.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Capaian Indikator Sasaran Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 tidak dilaksanakan dikarenakan sudah tidak ada lagi kegiatan terkait penanganan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sampai dengan Tahun 2023, berkaitan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang menetapkan bahwa seluruh kewenangan Provinsi di bidang Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di hapus sehingga tidak ada lagi kegiatan terkait penanganan kesesuaian fungsi struktur dan pola ruang.

**B. Analisis Program, Anggaran (alokasi dan realisasi) dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang, Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi kegiatan terkait penanganan Kesesuaian Fungsi Struktur dan Pola Ruang.

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis "Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan negara" sebesar 0%. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT **Belum Berhasil** mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

**Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim**

Sasaran 8 (delapan) mencakup indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 29**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Indeks Risiko Bencana	Poin	139,23	135	139,23	103,13	135	103,13
<b>Capaian Sasaran</b>					<b>103,13</b>		

Sumber data: LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

**A. Analisis terhadap Indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:**

1. Indeks Risiko Bencana

a. **Capaian Target Indeks Risiko Bencana**

Pada tahun 2023 target Indeks Risiko Bencana sebesar 135 poin, realisasi sebesar 139,23 poin. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 139,23 poin, maka capaian indeks risiko bencana di tahun 2023 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD 2023 sebesar 135 poin maka capaiannya sebesar 103,13%.

b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Berdasarkan capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa realisasi terhadap indikator Indeks Risiko Bencana telah mencapai target, adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini pada Tahun 2023, yaitu Adanya cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana kontijensi kebencanaan. Adapun dokumen rencana kontijensi yang telah dihasilkan adalah Rencana Kontijensi Gempa, Kekeringan dan Cuaca Ekstrem, Gunung Api. Kegiatan ini mendapat dukungan dari Program SIAP SIAGA dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk Tahun 2023 BNPB, BPBD dan World Food Programme (WFP) melakukan penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kekeringan (Review I).

## B. Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan Program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Perangkat Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 30  
Jumlah Program, Jumlah Dana (alokasi dan realisasi)  
menurut Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	4.332.623.300,-	1.899.787.172,-	43,85

Sumber: LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim" sebesar 103,13%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 1 program oleh 1 perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.332.623.300,- dan realisasi sebesar Rp. 1.899.787.172,- atau mencapai 43,85%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT **Sangat Berhasil** mencapai sasaran strategis pada Misi Ketiga RPJMD Tahun 2018-2023.

### Misi 4 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Misi empat diukur dengan capaian pada 3 (tiga) sasaran yaitu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kualiitas pemuda dan prestasi keolahragaan yang diuraikan sebagai berikut :

### Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Capaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 31  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Angka Melek Huruf	%	94,63	100	95,11	95,11	100	95,11
2.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,70	9,50	7,82	82,31	9,50	82,31
3.	Harapan Lama sekolah	Tahun	10,21	15	10,22	68,13	15	68,13
Rata-rata Capaian Sasaran						88,51		

Sumber data: BPS NTT 2023, diolah

#### A. Analisis terhadap capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

##### 1. Angka Melek Huruf

###### a. Capaian Target Angka Melek Huruf

Melek huruf adalah kemampuan seseorang membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya (selain huruf latin) yang masing-masing merupakan keterampilan dasar yang diajarkan di kelas-kelas awal jenjang pendidikan dasar. Angka Melek Huruf dihitung berdasarkan hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menggambarkan data tentang kesejahteraan rumah tangga serta keadaan sosial ekonomi masyarakat yang mencakup antara lain, pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli.

Berdasarkan SUSENAS 2023, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf di Provinsi NTT tahun 2022 sebesar 94,63 atau mengalami kenaikan (0,48)% dari tahun 2023 yang mencapai 95,11. Realisasi tersebut belum memenuhi target RPJMD pada tahun 2023 sebesar 100% sehingga terdapat gap sebesar 4,89%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100% maka capaiannya sebesar 95,11%.

Tabel 32  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Kelompok Umur Age Group	Pe kotaan Urban		Perdesaan Rurals		Perkotaan + Perdesaan Urban + Rural	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	100,00	99,83	99,38	99,71	99,54	99,74
20-24	99,80	100,00	98,67	99,17	98,99	99,43
25-29	98,77	99,19	98,62	98,58	98,66	98,75
30-34	99,22	99,67	97,32	98,02	97,81	98,45
35-39	99,62	99,94	95,61	97,29	96,68	97,99
40-44	99,41	98,91	96,22	96,50	97,01	97,13
45-49	97,89	99,69	94,73	95,39	95,55	96,54
50+	94,02	94,16	82,51	84,06	85,37	86,51
<b>Jumlah/Total</b>	<b>97,99</b>	<b>98,26</b>	<b>93,44</b>	<b>93,96</b>	<b>94,63</b>	<b>95,11</b>
15-24	99,89	99,91	99,03	99,46	99,27	99,60
15-44	99,49	99,62	97,80	98,31	98,25	98,68
15+	97,99	98,26	93,44	93,96	94,63	95,11
45+	94,93	95,51	85,27	86,56	87,70	88,78

Sumber data: BPS NTT 2023, diolah

- b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**  
Data ini menunjukkan Provinsi NTT hingga tahun 2023 belum terbebas dari buta aksara, masih terdapat 95,11 % penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di NTT yang belum dapat membaca dan menulis. Kontribusi terbesar tidak tercapainya target kinerja berasal dari kelompok umur 50 tahun ke atas sebesar 86,31 %. Hal ini disebabkan karena penduduk dengan usia 50 tahun ke atas sudah berada pada jenjang usia angkatan kerja bukan di jenjang usia sekolah. Kecenderungan kelompok usia 50 tahun ke atas untuk "relapse" menjadi buta aksara permanen sangat besar. Tahun 2023 penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah sebesar 46,76% dan yang tidak menyelesaikan sekolah (drop out) sebesar 14,83%. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan menyelesaikan pelajaran, tidak memiliki biaya sekolah, sakit parah, terpaksa bekerja,

membantu orang tua di ladang, dan dikeluarkan dari sekolah. Kondisi ini diperparah dengan belum maksimalnya dampak program kejar paket A dan paket B yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT serta Paket C yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Materi paket A, B dan C belum cukup fungsional atau "related" pada aktivitas produktif sehari-hari dari peserta.. Pada akhirnya kondisi ini tentu memberikan tantangan bagi pemerintah untuk memilih bentuk intervensi atau strategi yang kontekstual dan realistis dalam upaya mengurangi ketimpangan angka melek huruf sebesar 4,89% di NTT dan atau mengejar angka melek huruf 100 persen di akhir periode RPJMD Tahun 2023.

## 2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

### a. Capaian Target Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

RLS penduduk berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebesar 7,82 tahun, atau mengalami kenaikan 0,12 dari tahun 2022 yang mencapai 7,70 tahun. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 9,50 tahun maka terdapat gap sebesar 1,68 tahun. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 9,5 tahun. Capaian ini merupakan kontribusi RLS semua kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 33**  
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk NTT  
15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2022	2023	
<b>Kabupaten</b>				
1	Sumba Barat	6,85	6,92	0,07
2	Sumba Timur	7,33	7,57	0,24
3	Kupang	7,41	7,42	0,01
4	Timor Tengah Selatan	6,76	6,97	0,21
5	Timor Tengah Utara	7,97	8,16	0,19
6	Belu	7,38	7,39	0,01
7	Alor	8,43	8,45	0,02
8	Lembata	8,25	8,26	0,01
9	Flores Timur	7,79	8,04	0,25
10	Sikka	6,96	6,98	0,02



No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2022	2023	
11	Ende	8,09	8,20	0,11
12	Ngada	8,54	8,82	0,28
13	Manggarai	7,62	7,63	0,01
14	Rote Ndao	7,76	7,82	0,01
15	Manggarai Barat	7,80	7,94	0,14
16	Sumba Tengah	6,73	7,00	0,27
17	Sumba Barat Daya	6,37	6,38	0,01
18	Nagekeo	7,91	8,14	0,23
19	Manggarai Timur	7,42	7,70	0,07
20	Sobu Raijuu	6,77	6,98	0,28
21	Malaka	7,12	7,13	0,01
<b>Kota</b>				
1	Kota Kupang	11,61	11,62	0,01
<b>Nusa Tenggara Timur</b>		<b>7,69</b>	<b>7,82</b>	<b>0,13</b>

Sumber Data: BPS NTT, 2023

- b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**  
 Capaian RLS penduduk di NTT di 2022 sebesar 7.70 tahun telah menjadi 7.82 tahun dalam 2023 sebenarnya masih berada jauh di bawah standar 15 tahun yang dianjurkan PBB. Kenyataan ini konsisten dengan temuan bahwa angkatan kerja NTT didominasi oleh lulusan SD. Ini berarti jumlah tamatan SD yang melanjutkan ke SMP juga tidak banyak sehingga kecenderungan ini akan mengerucut ke atas. Data ini menunjukkan adanya celah cukup besar di antara APK dan APM bagi anak dan pemuda di NTT yang harus diintervensi pemerintah. Terutama bagi kelompok usia yang dapat memenuhi 15 tahun RLS di NTT.

### 3. Harapan Lama Sekolah (HLS)

#### a. Capaian Target Harapan Lama Sekolah

HLS Provinsi NTT pada tahun 2022 sebesar 13,21 tahun, naik 0,01 dibanding capaian tahun 2023 yaitu 13,22. Realisasi tahun 2023 belum mencapai target RLS tahun 2023 sebesar 15 tahun. Pada akhir RPJMD diharapkan angka HLS dapat mencapai 15 tahun sehingga perlu upaya mengejar ketertinggalan gap sebesar 1,78 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peluang

anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka HLS dan RLS merupakan dua komponen utama penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mewakili dimensi pendidikan. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA di NTT mengalami peningkatan. Secara langsung, ketika tingkat kelulusan SD, SMP dan SMA meningkatkan maka angka HLS dan RLS yang merupakan dua indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat. HLS Provinsi NTT merupakan kontribusi HLS kabupaten/kota yang dapat digambarkan tahun 2022 dan 2023 pada tabel berikut.

Tabel 34  
Harapan Lama Sekolah Penduduk NTT  
15 Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023

No	Kabupaten/Kota	TAHUN		Meningkat/ Menurun
		2022	2023	
<b>Kabupaten</b>				
1	Sumba Barat	13,15	13,26	0,11
2	Sumba Timur	12,85	12,86	0,02
3	Kupang	13,88	13,89	0,01
4	Timor Tengah Selatan	12,60	12,61	0,01
5	Timor Tengah Utara	13,34	13,35	0,01
6	Belu	12,30	12,31	0,01
7	Alor	12,27	12,28	0,01
8	Lembata	12,45	12,46	0,01
9	Flores Timur	12,94	12,95	0,01
10	Sikka	13,44	13,66	0,22
11	Ende	13,81	13,82	0,01
12	Ngada	12,73	12,74	0,01
13	Manggarai	13,70	13,71	0,01
14	Rote Ndao	13,21	13,22	0,01
15	Manggarai Barat	12,31	12,53	0,22
16	Sumba Tengah	13,12	13,13	0,01
17	Sumba Barat Daya	13,09	13,10	0,01
18	Nagekeo	12,51	12,59	0,08
19	Manggarai Timur	12,30	12,59	0,29
20	Sabu Raijua	13,17	13,18	0,01
21	Malaka	12,81	12,82	0,01
<b>Kota</b>				
1	Kota Kupang	16,43	16,44	0,01
<b>Nusa Tenggara Timur</b>		13,21	13,22	0,01

Sumber Data: BPS NTT, 2023



b. **Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja**

Data ini menunjukkan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun di NTT yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,22 tahun atau setara dengan Diploma I. kontribusi terbesar tidak tercapainya target HLS tahun 2023 disumbang oleh angka HLS Kabupaten Sikka, Manggarat Barat dan Manggarai Timur sebesar 12,53-13,66.

**B. Analisis Program dan Anggaran Perangkat Daerah yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja**

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 7 (tujuh) Program dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.047.644.667.606,- (*satu triliun empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enampuluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah*). Realisasi Rp.480.018.829.677 (*empat ratus delapan puluh miliar delapan belas juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) atau mencapai 45,81% dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, melalui 7 (tujuh) program dengan rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 35**  
Program, anggaran dan realisasi

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pengelolaan Pendidikan	1.013.259.388.911	451.232.550.500	44,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Pengembangan Kurikulum	6.470.259.935	4.439.039.245	68,60	
3.	Pengembangan Kebudayaan	4.951.284.600	4.560.572.027	92,10	
4.	Pengembangan Kesenian Tradisonal	7.473.821.460	6.909.886.733	92,45	
5.	Pembinaan Sejarah	1.143.732.660	919.846.680	80,42	
6.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	2.379.680.040	2.270.910.564	95,42	
7.	Pengelolaan Parnuseumari	11.966.500.000	9.686.023.928	80,94	
<b>Jumlah</b>		<b>1.047.644.667.606</b>	<b>480.018.829.677</b>	<b>45,81</b>	

Sumber: LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tahun 2023

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran "Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat" sebesar 88,51 % dengan kategori **Sangat Berhasil**.

**Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Capaian sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat diukur melalui dua indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 36**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	2023			RPJMD	
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,47	69	67,77	98	69	98
2.	Prevalensi Stunting	%	17,7	10-12	15,2*	73,33*	10-12	73,33
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>						<b>85,66</b>		

Sumber data: BPS NTT 2023, diolah. \*data e-PPGBM 2023

**A. Analisis terhadap capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:**

**1. Usia Harapan Hidup**

**a. Capaian Target Usia Harapan Hidup (UHH)**

UHH masyarakat Nusa Tenggara Timur tahun 2023 adalah 67,77 tahun atau mencapai 98 % dari target akhir RPMJD yaitu 69 tahun dan mengalami kenaikan 0,3 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 67,47 tahun. Namun demikian realisasi ini memiliki gap sebesar 1,33 dari target 2022 yaitu 68,8 tahun.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu komponen pembentuk IPM sekaligus sebagai indikator dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan terus hidup atau rata-rata jumlah tahun yang dijalani seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang Tahun ke-X. UHH Provinsi NTT merupakan kontribusi UHH Kabupaten/Kota di NTT sebagaimana tabel berikut :



Tabel 37  
Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2022-2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Umur Harapan Hidup Life Expectancy At Birth (Year)	
	2022	2023
Sumba Barat	67,35	67,57
Sumba Timur	65,38	65,82
Kupang	65,28	65,64
Timor Tengah Selatan	66,68	66,89
Timor Tengah Utara	67,35	67,61
Belu	65,28	65,63
Alor	61,99	62,35
Lembata	67,52	67,87
Flores Timur	65,62	65,96
Sikka	67,86	68,3
Ende	65,76	66,12
Ngada	68,40	68,71
Manggarai	67,38	67,63
Rote Ndao	65,26	65,6
Manggarai Barat	67,73	68
Sumba Tengah	68,65	68,87
Sumba Barat Daya	68,79	68,99
Nagekeo	67,56	67,91
Manggarai Timur	68,29	68,49
Sabu Raijua	60,87	61,06
Malaka	65,34	65,67
<b>Kota/Municipality</b>		
Kota Kupang	70,11	70,52
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>67,47</b>	<b>67,77</b>

Sumber Data: BPS NTT 2024, diolah

#### b Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan UHH melalui program peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, ditandai dengan naiknya UHH sebesar 0,30 poin di tahun 2023 dibandingkan realisasi tahun 2022. Hal ini membuktikan masyarakat NTT mampu bertahan meskipun keadaan lingkungan yang tidak mendukung, kekurangan ketersediaan pangan serta perekonomian masyarakat yang sekaligus menjadi penyebab melambatnya laju pertumbuhan angka UHH Provinsi NTT di dua tahun terakhir.

## 2 Prevelensi Stunting

### a. Capaian Target Prevalensi Stunting Menurut Data e-PPGBM

Prevelensi stunting tahun 2023 di Provinsi NTT adalah 15,2% (Data e-PPGBM) atau mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 2,5 % dibanding capaian tahun 2022 yaitu 17,7%. Namun jika dibandingkan dengan target akhir

RPJMD sebesar 10-12% maka terdapat gap sebesar 5,5-3,5 % di tahun 2023 sehingga rata-rata penurunan angka stunting di NTT dalam dua tahun terakhir sebesar 3% per tahun.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi kronis dan menderita penyakit berujung yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Prevelensi stunting Provinsi NTT merupakan kontribusi dari kabupaten dan kota di NTT sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 38**  
**Prevelensi Stunting menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2022-2023**

No	Kabupaten/Kota	2022		2023	
		Stunting	%	Stunting	%
1	Sumba Barat	2.611	23,3	1.291	12,1
2	Sumba Timur	3.478	14,9	2.677	11,8
3	Kupang	6.118	19,9	3.872	13,0
4	Timor Tengah Selatan	11.642	28,3	8.924	22,3
5	Timor Tengah Utara	5.280	24,4	4.555	22,6
6	Belu	2.473	13,7	1.984	11,1
7	Alor	2.119	11,7	1.773	10,0
8	Lembata	1.398	16,0	1.045	11,7
9	Flores Timur	3.412	18,7	3.184	18,1
10	Sikka	3.174	13,8	3.318	15,3
11	Ende	1.749	8,9	1.241	6,8
12	Ngada	1.027	9,3	902	8,4
13	Manggarai	4.313	16,2	3.481	13,1
14	Rote Ndao	3.011	22,3	2.764	20,5
15	Manggarai Barat	3.675	15,9	1.901	8,2
16	Sumba Tengah	659	8,7	549	7,3
17	Sumba Barat Daya	8.270	24,3	9.762	31,9
18	Nagekeo	946	8,4	728	6,9
19	Manggarai Timur	2.408	9,6	2.195	9,0
20	Sabu Raijua	1.496	18,1	1.230	15,2
21	Malaka	2.582	15,9	2.409	15,5



22	Kota Kupang	5.497	21,5	4.019	17,2
	Provinsi NTT	77.338	17,7	3.804	15,2

Sumber Data: Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, Dinas Kesehatan

#### **b. Capaian Target Prevalensi Stunting Menurut Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023**

Evaluasi status gizi balita secara nasional dilakukan dalam suatu survei yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Survei nasional terkait evaluasi status gizi yang terakhir dilaksanakan yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menggunakan metode pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan. Riskesdas dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan pemerintah memerlukan monitoring dan evaluasi status gizi stunting balita setiap tahun berdasarkan indikator output intervensi gizi spesifik dan sensitif di tiap kabupaten/kota. Oleh karena itu sejak tahun 2019-2024 dilaksanakan SSGI untuk mengukur status gizi balita dan juga untuk menilai keberhasilan kinerja presiden dalam penanganan stunting tiap tahun

Selanjutnya Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 merupakan pengumpulan data yang dilakukan karena interval untuk setiap 5 (lima) tahun sekali jatuh di tahun 2023 sehingga dilakukanlah SKI tersebut yang dulunya bernama Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, pelaksanaan lima tahun sekali karena dianggap interval yang tepat untuk menilai perkembangan status kesehatan masyarakat, faktor risiko terkait derajat kesehatan, dan perkembangan upaya pembangunan kesehatan, diukur sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia dimana data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

**Tabel 39**  
**Situasi Stunting Provinsi NTT Tahun 2021 - 2023, SSGI & SKI**

No	Kabupaten/Kota	SSGI 2021	SSGI 2022	SKI 2023	TARGET NTT (SSGI) 2023	TREN SSGI 2022 - SKI 2023
1	2	3	4	5	6	7=(4-5)
1.	KAB SUMBA BARAT	37,0	36,0	42,5	27,1	NAIK
2.	KAB SUMBA TIMUR	28,8	32,2	26,3	21,2	TURUN
3.	KAB KUPANG	40,4	38,4	38,4	27,9	TETAP
4.	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	48,3	45,2	50,1	36,2	NAIK
5.	KAB TIMOR TENGAH UTARA	46,7	38,7	42,7	34,7	NAIK
6.	KAB BELU	39,9	36,6	48,1	29,3	NAIK
7.	KAB ALOR	44,8	36,7	39,3	33,4	NAIK
8.	KAB LEMBATA	31,7	31,8	35,1	23,1	NAIK
9.	KAB FLORES TIMUR	23,4	27,4	37,2	17,4	NAIK
10.	KAB SIKKA	26,6	32,7	33,3	19,9	NAIK
11.	KAB ENDE	27,2	35,1	27,5	20,4	TURUN
12.	KAB NGADA	29,0	31,2	21,3	21,3	TURUN
13.	KAB MANGGARAI	33,1	33,7	36,8	24,5	NAIK
14.	KAB ROTE NDAO	40,1	38,4	39,8	28,1	NAIK
15.	KAB MANGGARAI BARAT	38,5	38,9	36,2	27,9	TURUN
16.	KAB SUMBA TENGAH	30,4	29,6	39,5	24,9	NAIK
17.	KAB SUMBA BARAT DAYA	44,0	39,8	44,3	24,8	NAIK
18.	KAB NAGEKEO	28,1	30,5	24,9	20,8	TURUN
19.	KAB MANGGARAI TIMUR	42,9	40,5	43,7	31,8	NAIK
20.	KAB SABU RAIJUA	33,9	30,6	36,9	23,9	NAIK
21.	KAB MALAKA	31,4	32,9	47,7	23,0	NAIK
22.	KOTA KUPANG	26,1	19,2	29,9	18,8	NAIK
	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>37,8</b>	<b>35,3</b>	<b>37,9</b>	<b>26,1</b>	<b>NAIK</b>

Sumber : SSGI 2021, SSGI 2022 & SKI 2023

Prevalensi stunting di Provinsi NTT Tahun 2023 sebesar 37,9 %, Naik 2,6 % dari tahun 2022 dan berjarak 11,8 % dari target yang dibebankan untuk mendukung target penurunan stunting nasional sebesar 14 %. Namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 10% maka terdapat gap sebesar 27,9-25,8%. Dari 22 kabupaten yang ada di Provinsi NTT terdapat 5 kabupaten mengalami penurunan prevalensi stunting dan 1 kabupaten tetap sedangkan 17 kabupate/kota mengalami peningkatan.



### c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Keberhasilan penurunan prevelensi stunting di Provinsi NTT dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan berbagai upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu prevelensi stunting menjadi prioritas dari RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kolaborasi lintas sektor dan kolaborasi bersama pemerintah daerah kab/kot, pengembangan inovasi pencegahan stunting, kerjasama dengan Badan PBB baik bilateral dan orientasi sosial kemasyarakatan dan lembaga keagamaan serta adanya dukungan dana desa.

### B. Analisis Program dan Anggaran Perangkat Daerah Yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 (dua) Program (dengan anggaran sebesar: Rp. 171.812.455.341,- (*seratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*)), dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Realisasi Rp.140.675.531.333,- (*seratus empat puluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*) atau mencapai 81,88% sampai dengan akhir tahun dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 40  
Program, anggaran dan realisasi

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	144.896.479.865	116.542.973.863	80,4	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	26.915.975.476	24.132.557.470	89,7	
	Jumlah	171.812.455.341	140.675.531.333	81,88	

Sumber: LKIP Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil 2023

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran **“Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat”** sebesar **93,38%** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

### Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Prestasi Keolahragaan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Prestasi keolahragaan diukur melalui capaian satu indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 41  
Target dan Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			RPJMD	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD 2023
Cakupan pembinaan Kepemudaan dan keolahragaan	%	74,68	80	145,5	181,8	80	
Capaian Sasaran					181,8		

Sumber data: LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTT, 2023

#### A. Analisis terhadap capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

##### 1. Cakupan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan

###### a. Capaian Target Cakupan Pembinaan Kepemudaan dan Keolahragaan

Pada tahun 2022 cakupan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan adalah sebesar 74,68% atau terealisasi 145,5% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 65,5% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 80%, maka cakupan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan mencapai 145,5%.

###### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Pada tahun 2023 indikator cakupan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan mengalami peningkatan yang signifikan hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan melalui peningkatan proporsi pertambahan wirausaha muda, peningkatan presentase perolehan medali cabang

olahraga prestasi dan paralympic serta pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan kwarda dan kwarcab.

**B. Analisis Program, Kegiatan dan Anggaran (alokasi dan realisasi) dan Perangkat Daerah yang Menunjang Pencapaian Target Kinerja**

Pencapaian sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) Program dan dengan dukungan anggaran sebesar: Rp. 16.334.070.465 (*enam belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*). Realisasi Rp. 14.526.930.570 (*empat belas miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ratus tujuh puluh rupiah*) atau mencapai **88,92%** sampai dengan akhir tahun dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 42  
Program, anggaran dan realisasi Tahun 2023

No	Program	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian	Perangkat Daerah
1.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.290.000.000	620.000.000	48,06	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	14.144.070.465	13.006.930.578	91,96	
3.	Pengembangan Kapasitas kepramukaan	900.000.000	900.000.000	100	
<b>Jumlah</b>		<b>16.334.070.465</b>	<b>14.526.930.570</b>	<b>88,92</b>	

Sumber data: LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Prov.NTT, 2023

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata capaian sasaran "Meningkatnya Kualitas pemuda dan Prestasi Keolahragaan" sebesar **181,18%** dengan kategori **Sangat Berhasil**.

**Misi 5 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, efektif, lincah dan kolaboratif. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-

nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Keberhasilan pelaksanaan misi kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT tahun 2018-2023 diukur dengan pencapaian target kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. Sasaran strategis tersebut mencakup 7 (tujuh) indikator dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 43  
Target dan Capaian Indikator Kinerja Misi 5 RPJMD 2018-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Data 2022	2023			Target Akhir RPJMD	Capaian Terhadap RPJMD
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	83,10	71	66,18	93,21	71	93,21
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP*)	WTP (100)	WTP	WTP
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	Predikat B (83,85)	Predikat A (>80-90)	Predikat B 64,69	79,74	Predikat A (>80-90)	79,74
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	2,7	3,83	141,85	2,7	141,85
5.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	76,99	75	77,06 (Cukup Informatif)	102,74	75	102,74
6.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85,82	90	86,32 (Baik)	95,91	90	95,91
7.	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	77,83	83	77,83*)	93,77	83	93,77
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>						<b>101,03 (Sangat Baik)</b>		

Sumber data: Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, BPS NTT, Badan Keuangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika, diolah \*) data tahun 2022

#### A. Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

##### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

###### a. Capaian target Indeks Reformasi Birokrasi

Target nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sebesar 71 dengan realisasi sebesar 66,18 atau mencapai 93,21% dari target. Hasil evaluasi



tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2022 PMPRB mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB yang menggunakan metode PMPRB, sementara pada tahun 2023 menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan menggunakan metode *double track* yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 71, maka terdapat gap sebesar 4,82 poin atau capaian nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai 93,21%.

b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**  
Realisasi nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.
- 2) Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi General belum didasarkan pada *baseline* tahun sebelumnya.
- 3) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menyusun kerangka logis Reformasi Birokrasi tematik sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi.
- 4) Pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya menyusun rencana aksi untuk tema pengendalian laju inflasi dan digitalisasi pemerintahan dengan fokus penanganan *stunting* dari 5 (lima) tema yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat.

## 2. **Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

### a. **Capaian Target Opini BPK**

Target opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa



Tenggara Timur pada tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berhubung sampai dengan bulan Maret tahun 2024 BPK belum mengeluarkan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka dalam analisis ini digunakan data realisasi tahun 2022 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Jika menggunakan data realisasi tahun 2022 tersebut, maka tahun 2023 sama hasilnya yaitu WTP, jika dibandingkan dengan target WTP pada tahun terakhir RPJMD, capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 telah memenuhi target.

- b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**  
Realisasi opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 yang dirilis tahun 2024 diharapkan mencapai target. walaupun pada tahun 2022 telah memenuhi target tetapi terdapat beberapa catatan terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:
- 1) Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personel atas Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) senilai Rp759.570.021,00;
  - 2) Kekurangan volume pekerjaan atas 12 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp988.276.689,36; dan
  - 3) Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi NTT belum tertib.

### 3. **Nilai Akuntabilitas Kinerja**

#### a. **Capaian Target Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Target nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 adalah Predikat A (>80-90) dengan realisasi sebesar Predikat B (64,59) atau mencapai 79,74%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 63,65 maka terjadi peningkatan sebesar 0,94 poin atau meningkat sebesar 1,47%. Jika dibandingkan dengan target tahun terakhir RPJMD Predikat A (>80-90), maka



terdapat gap sebesar 16,41 poin.

- b. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja**  
Realisasi nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
- 1) Masih ditemukan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada perencanaan khususnya pada Perangkat Daerah yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time- Bound*) dan cukup berorientasi *outcome* dan cukup untuk mengawal tujuan dan sasaran strategis;
  - 2) Penetapan target perencanaan pada Perjanjian Kerja tahun 2023 belum memanfaatkan analisa atas pencapaian target sebelumnya, sehingga masih ditemukan target kinerja yang *undervalue* dibanding capaian kinerja sebelumnya;
  - 3) Pohon kinerja yang disusun belum menggambarkan *Critical Success Factor* (CSF) dengan sempurna sehingga belum terlihat alternatif-alternatif kinerja dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah;
  - 4) Masih ditemukan dokumen Indikator Kinerja Utama tingkat perangkat daerah yang belum memiliki defenisi operasional dan formulasi perhitungan;
  - 5) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui aplikasi e-monev masih fokus pada ketercapaian program/kegiatan dan anggaran dari tiap perangkat daerah sehingga belum dapat melihat detail ketercapaian indikator sasaran kinerja yang diperjanjikan;
  - 6) Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik (e-monev), namun belum terlihat komitmen dari Perangkat Daerah dalam memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja, hal ini dibuktikan belum adanya *feedback* perbaikan dari pimpinan unit/ satuan kerja terkait pencapaian kinerja yang tidak tercapai;

- 7) Masih ditemukannya pelaporan akuntabilitas kinerja yang belum menyampaikan detail informasi analisa yang memadai, yaitu terkait dengan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai kinerja, efisiensi sumber daya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja dan upaya perbaikan dalam proses mencapai mendatang khususnya untuk capaian kinerja yang belum melewati target;
- 8) Belum maksimalnya penggunaan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, dimana dapat dilihat dari masih ada beberapa target kinerja pada tahun berjalan yang lebih rendah dari capaian kinerja tahun sebelumnya pada beberapa perangkat daerah;
- 9) Pemahaman atas implementasi SAKIP oleh setiap evaluator internal belum merata, sehingga berpengaruh terhadap ketajaman dan keselarasan dalam melakukan evaluasi dan penyimpulan hasil penilaian yang belum sepenuhnya baik;
- 10) Temuan dan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi belum cukup menyasar secara langsung pada permasalahan yang dialami oleh perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP;
- 11) Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan tagging penanggulangan kemiskinan ekstrim pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 835.236.933.261,-atau 16,34% dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 63 sub kegiatan.
- 12) Akuntabilitas kinerja penanggulangan kemiskinan masih terdapat alokasi anggaran untuk sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan ekstrim serta alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan masih digunakan untuk membiayai konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas dan lainnya.

#### 4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

##### a. Capaian Target Indeks SPBE

Target nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sebesar 2,7, dengan realisasi sebesar 3,83 atau mencapai 141,85% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3,35, maka terdapat peningkatan sebesar 0,48 poin atau 14,32%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 2,7, maka capaian tahun 2023 telah melampaui sebesar 1,13 poin atau 141,85% sehingga Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut.

##### b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi nilai indeks SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 melampaui target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya peran kerja kolaboratif antara perangkat daerah dan Dinas Kominfo dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang ada di Perangkat Daerah mulai dioptimalkan terlibat dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan TIK.
- 3) Beberapa aplikasi umum berbagi pakai mulai diterapkan secara maksimal dan terintegrasi pada semua perangkat daerah antara lain bidang perencanaan dan penganggaran, bidang pengadaan barang dan jasa, bidang kepegawaian, bidang perizinan dan pengaduan masyarakat.
- 4) Penggunaan aplikasi *e-purchasing* dan SRIKANDI telah diperjanjikan dalam Kontrak kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan para Kepala Perangkat Daerah.
- 5) Penerapan aplikasi khusus terintegrasi pada semua perangkat daerah antara lain sistem absensi elektronik, tata naskah dinas elektronik (Srikandi) dan penggunaan tanda tangan elektronik

sudah diimplementasikan.

- 6) Telah tersedianya instrumen regulasi terkait rancangan pembangunan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menyelaraskan pembangunan SPBE pada instansi Perangkat Daerah.
- 7) Telah adanya regulasi yang mengatur terkait peta proses bisnis, infrastruktur, data dan informasi, layanan aplikasi serta keamanan SPBE.

## 5. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

### a. Capaian Target Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

Target nilai indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sebesar 75 poin, dengan realisasi sebesar 77,06 point atau mencapai 102,74% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 76,99, maka capaian terjadi peningkatan sebesar 0,07 poin atau 0,09%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 75, maka tingkat keterbukaan informasi publik sudah melebihi target 2,06 point.

### b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja

Realisasi target nilai indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan Pimpinan dalam melaksanakan Monev SAQ (*Self Assessment Questionnaire*).
- 2) Adanya forum komunikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- 3) Adanya media komunikasi berupa WA Grup sebagai tempat sharing informasi, diskusi dan bertanya apabila ada kendala.
- 4) PPID Utama yang menjalankan fungsi kontrol dan monitoring yang baik.
- 5) Tim PPID Utama menjemput bola ke Perangkat Daerah untuk pengampilan data SAQ.
- 6) Adanya kerjasama dengan NGO (*Non Governmental*



*Organization*) yaitu USAID ERAT untuk mendukung kegiatan Keterbukaan Informasi Publik.

- 7) Adanya keaktifan website PPID Utama, PPID pelaksana, website ntprov dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah dalam pemberitaan Program/Kegiatan untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik

## 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

### a. Capaian Target Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target nilai IKM Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sebesar 90, dengan realisasi sebesar 86,32 atau mencapai 95,91% dari target. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 85,82, maka terjadi peningkatan sebesar 0,50 poin atau 0,58%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 90, maka terdapat gap sebesar 3,68 poin.

### b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh unit penyelenggara layanan publik
- 2) SPP yang telah ditetapkan belum publikasikan secara maksimal, terutama melalui website.
- 3) Kualitas sarana dan prasarana pada pada unit penyelenggara layanan publik belum memadai.
- 4) Kompetensi dan profesionalisme pelaksana pada unit penyelenggara layanan publik masih rendah.

## 7. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

### a. Capaian Target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Target nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sebesar 83. Berhubungan sampai dengan bulan Maret tahun 2024 Badan Pusat Statistik Provinsi NTT belum merilis data IDI tahun 2023, maka dalam analisis ini digunakan data capaian tahun 2022 sebesar 77,83. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 83, maka terdapat gap sebesar 5.17 poin.

### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja

Realisasi nilai IDI Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena prevalensi *hearing*, audiensi, dan berbagai forum DPR (rapat dengar pendapat umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sebagainya) di DPRD Provinsi NTT terhadap total anggota DPRD Provinsi NTT masih rendah.
- 2) Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN maupun APBD oleh pemerintah berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya informasi APBD berupa Perda tentang APBD, ringkasan RKA-SKPD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD, laporan realisasi anggaran SKPD, LKPD yang sudah audit (Y-1), dan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah di website Pemerintah Provinsi NTT
- 3) Indeks Pelayanan Publik yang masih rendah antara lain disebabkan oleh:
  - Belum semua penyelenggara layanan publik menerapkan Standar Pelayanan Publik;
  - Rendahnya Profesionalisme SDM (Kompetensi, Responsivitas, Kode Etik, Pemberian Penghargaan dan Sanksi, dan Budaya Pelayanan);



- Keterbatasan sarana prasarana (kenyamanan ruang tunggu dan fasilitas lainnya, sarana prasarana bagi yang berkebutuhan khusus, sarana prasarana penunjang lain, dan sarana front office);
  - Masih rendahnya Sistem Informasi Pelayanan Publik meliputi Sistem Informasi Elektronik dan Sistem Informasi Non Elektronik;
  - Masih terbatasnya sarana dan media konsultasi dan pengaduan serta rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses;
  - Masih terbatasnya inovasi pelayanan publik yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas.
- 4) Pemenuhan hak-hak pekerja berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena masih cukup banyak pekerja yang belum memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.
  - 5) Kesetaraan dalam pelayanan dasar Provinsi berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan akan akses terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar, Angka Partisipasi Murni pendidikan SD, SMP, SMA) untuk semua rumah tangga masih rendah.
  - 6) Kinerja lembaga legislatif berada pada kategori rendah, hal ini disebabkan karena jumlah Peraturan Daerah yang disahkan belum dapat memenuhi target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah direncanakan.

#### **B. Analisis Program, Anggaran dan Perangkat Daerah yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Target Kinerja**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari Misi kelima RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 33 Program pada tahun 2023 yang



dilaksanakan oleh 18 Perangkat Daerah. Rincian terkait jumlah program, alokasi dan realisasi dana menurut Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 44**  
**Jumlah Program, Jumlah dana (alokasi dan realisasi)**  
**Menurut Perangkat Daerah**

NO	Nama Perangkat Daerah	Program	Anggaran	Realisasi	%
			(Rp.)	(Rp.)	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.118.734.200	1.112.588.200	99,45
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.100.090.720	4.961.693.650	97,29
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	36.140.000	34.430.000	95,27
2	Badan Kecatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.453.023.640	2.139.161.030	87,21
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	174.042.905.860	139.374.347.300	80,08
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	61.424.000	57.416.000	93,47
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	289.012.540	258.007.600	89,27
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial	2.342.737.320	1.968.289.360	84,02
3	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.275.097.100	2.985.167.353	56,59
		Program Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	1.901.546.150	1.192.582.660	62,72
4	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	838.321.600	530.675.620	63,30
		Program Kesejahteraan Rakyat	13.096.556.940	6.414.126.794	48,98
5	Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.836.253.020	1.584.698.450	86,30
6	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Program Perekonomian dan Pembangunan	574.998.700	386.338.490,00	67,19
		Program Administrasi Pembangunan	99.999.740	84.724.300	84,72



7	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Program Kebijakan dan Pelayanan PBJ	6,018,807,500	5,350,206,024	88.89
8	Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Program Penataan Organisasi	1,422,476,620	1,223,830,178	86.04
9	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,845,621,658	2,755,714,092	96.84
10	Biro Umum Setda Provinsi NTT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53,809,092,288	47,214,705,470	87.74
11	Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	77,828,234,400	68,230,549,593	87.67
12	Bappellitbangda Provinsi NTT	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,723,505,032	1,244,722,223	45.70
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2,967,935,700	1,201,514,731	40.48
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	667,570,763	330,896,440	49.57
13	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Program Kepegawaian Daerah	2,746,079,800	2,346,569,876	85.45
14	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	745,535,766,688	671,764,381,067	90.10
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,438,336,320	1,365,898,375.00	94.95
15	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,008,228,712	1,216,930,374	40.45
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14,823,987,743	13,950,064,400	94.10
16	Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTT	Program Pengembangan SDM	13,327,373,863	10,862,613,759	81.51
17	Badan Penghubung Provinsi NTT	Program Pelayanan Penghubung	595,205,000	573,366,934	96.33
18	Badan Perbatasan Provinsi NTT	Program Pengelolaan Perbatasan	799,999,900	521,724,122	65.22
Jumlah			1,139,625,063,517	993,237,734,465	87.15

Sesuai penjelasan di atas, maka rata-rata pencapaian sasaran strategis **"Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif"** sebesar 101,03%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh pelaksanaan 33 program oleh 18 Perangkat daerah dengan alokasi anggaran



sebesar Rp1,139,625,063,517 dan realisasi Rp 993,237,734,465 atau mencapai 87.15%. Berdasarkan data rerata realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT berhasil mencapai sasaran strategis pada Misi kelima RPJMD 2018-2023.

Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 sesuai misi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 45  
Capaian Kinerja Menurut Misi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023

NO	MISI	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	SKALA ORDINAL
1.	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil	92,75	Cukup Berhasil
2.	Membangun NTT sebagai salah satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )	120,35	Sangat Berhasil
3.	Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur untuk mempercepat Pembangunan	103,13	Sangat Berhasil
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	181,18	Sangat Berhasil
5.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	101,03	Sangat Berhasil
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>		<b>119,69</b>	<b>Sangat Berhasil</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pemprov NTT selama Tahun 2023 dikategorikan **Sangat Berhasil**. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target 55 (*lima puluh lima*) indikator kinerja, 21 (*Dua Puluh satu*) sasaran dari 5 (Lima) Misi.

### 3.3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan memuat tentang analisis penggunaan sumber daya keuangan yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

#### 1. Efektivitas penggunaan anggaran

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan Target anggaran belanja. Menurut keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efektivitas belanja sebagai berikut:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.

- b. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif
- c. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
- d. Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
- e. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

**Tabel 46**  
**Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Pada 33 Perangkat Daerah**  
**Lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2023**

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,090,539,255,771.00	1,984,638,449,106.90	94.93	Efektif
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	371,328,954,752.00	308,211,973,820.37	83.00	Cukup Efektif
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	206,252,782,874.00	173,028,779,243.00	83.89	Cukup Efektif
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	233,457,555,317.00	200,553,416,666.00	85.91	Cukup Efektif
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13,708,942,700.00	11,352,634,994.00	82.81	Cukup Efektif
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,368,652,200.00	7,139,578,376.00	68.86	Kurang Efektif
7	Dinas Sosial	71,687,285,572.00	50,115,304,710.00	69.91	Kurang Efektif
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,892,432,255.00	5,627,308,146.00	81.64	Cukup Efektif
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99,979,559,782.00	87,629,909,646.00	87.65	Cukup Efektif
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,051,591,780.00	7,401,465,357.00	81.77	Cukup Efektif
11	Dinas Perhubungan	22,077,936,280.00	19,894,358,340.00	90.11	Cukup Efisien
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,590,100,235.00	12,662,309,049.00	93.17	Efektif
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31,422,755,876.00	24,365,608,710.00	77.54	Kurang Efektif
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,965,030,448.00	7,088,720,956.00	89.00	Cukup Efektif
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	26,986,859,014.00	24,152,969,644.00	89.50	Cukup Efektif

16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15,164,712,248.00	10,329,912,174.00	68.12	Ekurang Efektif
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	51,579,537,247.00	47,152,417,645.00	91.42	Efektif
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10,521,011,760.00	8,322,815,279.00	79.11	Kurang Efektif
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74,720,980,332.00	65,374,470,056.00	87.49	Kurang Efektif
20	Dinas Peternakan	28,972,514,344.00	25,171,224,457.00	86.88	Kurang Efektif
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	103,759,651,444.00	98,660,648,111.00	95.09	Efektif
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12,185,712,848.00	9,062,951,522.00	74.37	Kurang Efektif
23	Sekretariat Daerah	116,039,508,855.00	97,344,492,340.50	83.89	Kurang Efektif
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	147,365,956,040.00	132,195,746,389.00	89.71	Kurang Efektif
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18,586,954,290.00	14,029,735,446.00	75.48	Kurang Efektif
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	85,317,757,937.00	74,921,430,177.00	87.81	Kurang Efektif
27	Badan Keuangan Daerah	760,988,379,960.00	747,373,878,616.00	98.21	Cukup Efisien
28	Badan Kepegawaian Daerah	12,209,004,680.00	10,829,748,522.00	88.70	Kurang Efektif
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26,207,008,870.00	21,529,402,310.00	82.15	Kurang Efektif
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5,896,135,120.00	5,041,963,134.00	85.51	Kurang Efektif
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7,953,516,550.00	7,394,721,334.00	92.97	Efektif
32	Inspektorat Daerah	18,655,098,580.00	14,198,502,163.00	76.11	Kurang Efektif
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184,352,330,860.00	148,180,194,029.00	80.38	Kurang Efektif
<b>JUMLAH</b>		<b>4,895,785,466,821.00</b>	<b>4,460,977,040,468.77</b>	<b>91.12</b>	<b>Efektif</b>

## 2. Efisiensi penggunaan anggaran

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total anggaran belanja. Menurut keputusan Menteri dalam negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja



- dikatakan tidak efisien.
- b. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja kurang efisien.
- c. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
- d. Jika pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
- e. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

**Tabel 47**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada 33 Perangkat Daerah**  
**Lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2023**

No	SKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,090,539,255,771.00	1,984,638,449,106.90	94.93	Cukup Efisien
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	371,328,954,752.00	308,211,973,820.37	83.00	Cukup Efisien
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	206,252,782,874.00	173,028,779,243.00	83.89	Cukup Efisien
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	233,457,555,317.00	200,553,416,666.00	85.91	Cukup Efisien
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13,708,942,700.00	11,352,634,994.00	82.81	Cukup Efisien
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,368,652,200.00	7,139,578,376.00	68.86	Efisien
7	Dinas Sosial	71,687,285,572.00	50,115,304,710.00	69.91	Efisien
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,892,432,255.00	5,627,308,146.00	81.64	Cukup Efisien
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99,979,559,782.00	87,629,909,846.00	87.65	Cukup Efisien
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,051,591,780.00	7,401,465,357.00	81.77	Cukup Efisien
11	Dinas Perhubungan	22,077,936,280.00	19,894,358,340.00	90.11	Cukup Efisien
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13,590,100,235.00	12,662,309,049.00	93.17	Cukup Efisien
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31,422,755,876.00	24,365,608,710.00	77.54	Efisien
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,965,030,448.00	7,088,720,956.00	89.00	Cukup Efisien
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	28,986,859,014.00	24,152,969,644.00	89.50	Cukup Efisien



16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15,164,712,248.00	10,329,912,174.00	68.12	Efisien
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	51,579,537,247.00	47,152,417,645.00	91.42	Cukup Efisien
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10,521,011,760.00	8,322,815,279.00	79.11	Efisien
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74,720,980,332.00	65,374,470,056.00	87.49	Cukup Efisien
20	Dinas Peternakan	28,972,514,344.00	25,171,224,457.00	86.88	Cukup Efisien
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	103,759,651,444.00	98,660,648,111.00	95.09	Cukup Efisien
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12,185,712,848.00	9,062,951,522.00	74.37	Efisien
23	Sekretariat Daerah	116,039,508,855.00	97,344,492,340.50	83.89	Cukup Efisien
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	147,365,956,040.00	132,195,746,389.00	89.71	Cukup Efisien
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18,586,954,290.00	14,029,735,446.00	75.48	Efisien
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	85,317,757,937.00	74,921,430,177.00	87.81	Cukup Efisien
27	Badan Keuangan Daerah	760,988,379,960.00	747,373,878,616.00	98.21	Cukup Efisien
28	Badan Kepegawaian Daerah	12,209,004,680.00	10,829,748,522.00	88.70	Cukup Efisien
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26,207,008,870.00	21,529,402,310.00	82.15	Cukup Efisien
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5,896,135,120.00	5,041,963,134.00	85.51	Cukup Efisien
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7,953,516,550.00	7,394,721,334.00	92.97	Cukup Efisien
32	Inspektorat Daerah	18,655,098,580.00	14,198,502,163.00	76.11	Efisien
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184,352,330,860.00	148,180,194,029.00	80.38	Cukup Efisien
<b>JUMLAH</b>		<b>4,895,785,466,821.00</b>	<b>4,460,977,040,468.77</b>	<b>91.12</b>	<b>Cukup Efisien</b>

